



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021 T.A 2022**

**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2022**



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 mengamanatkan Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta merupakan salah satu bahan evaluasi bagi Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan terhadap Pemerintah Daerah guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Ruang lingkup laporan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dengan memperhatikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan indikator kinerja pada masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, capaian pelayanan dasar dan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.

Penulisan LPPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 mengacu pada sistematika yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan susunan sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**, yang memuat Penjelasan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum.
2. **Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, yang memuat Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
3. **Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan**, yang memuat dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan, gambaran umum pelaksanaan tugas pembantuan di provinsi, dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.



4. **Bab IV Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimum**, yang memuat urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum; Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Sosial; dan Program & Kegiatan.

5. **Bab V Penutup.**

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada Tanggal 1 Juli 2004;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Presiden Nomor 40/P Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Bengkulu Masa Jabatan Tahun 2021-2024;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelayanan Standar Minimal (SPM);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4).
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 723);
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120.04/6976/OTDA Tanggal 31 Desember Tahun 2019 Perihal Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019.

1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tanggal 24 September 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia, mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.

Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi dimulai pada tanggal 1 Juli 2004 yang dipusatkan di Kota Batam dan kemudian setahun kemudian berangsur pindah ke Ibukota Provinsi di Kota Tanjungpinang. Saat ini Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau berada di Pulau Dompak, Kota Tanjungpinang.

b. Data Geografis Wilayah

Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu Provinsi di Indonesia secara Geografis terletak pada posisi yang sangat strategis dan berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia Tenggara. Provinsi Kepulauan Riau mempunyai luas daratan sebesar 8.201,72 km², terletak pada 0°29'LS - 4°40'LU dan 103°22'BT - 109°40'BT.

**Tabel 1.1 Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau
Menurut Permendagri Nomor 72 Tahun 2019**

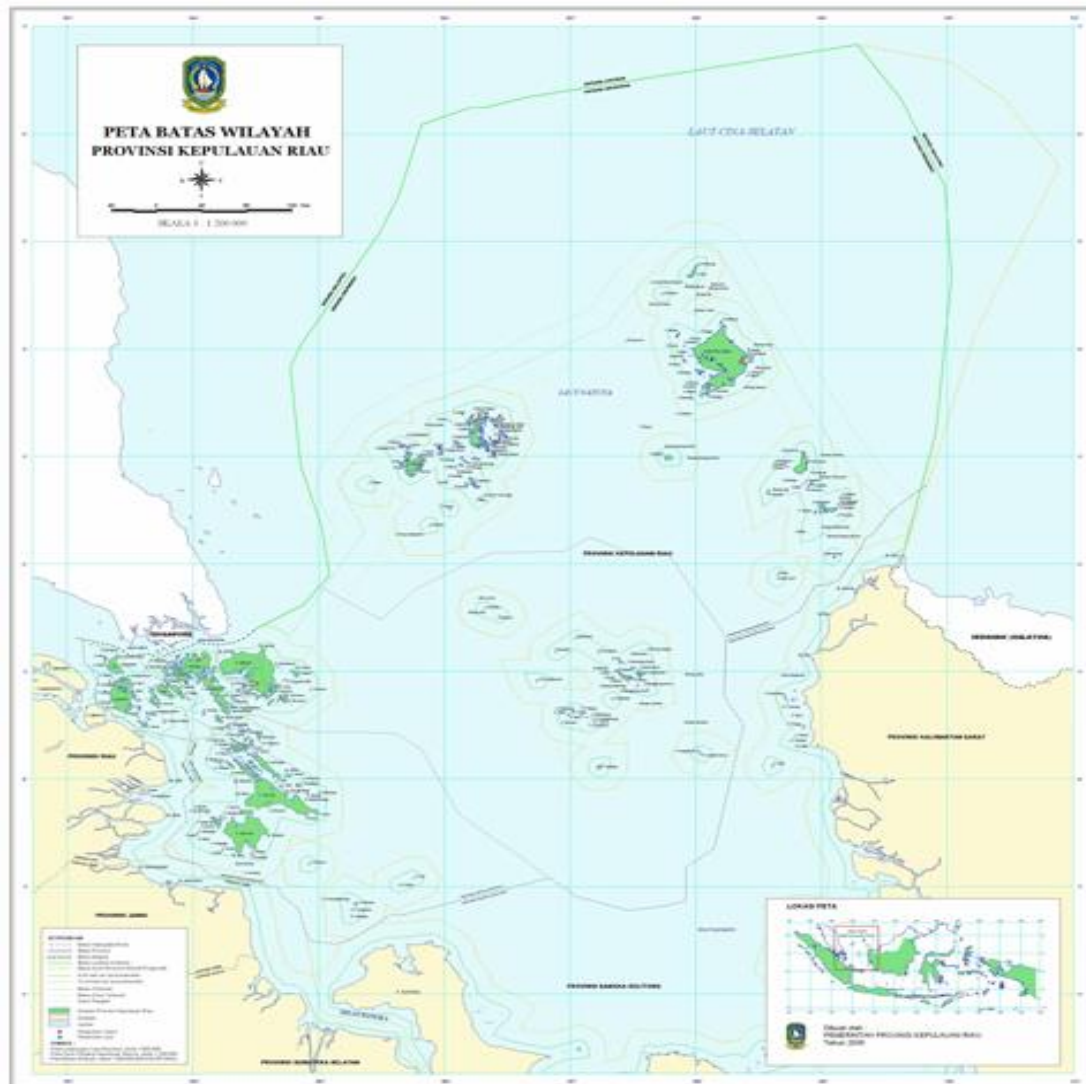
No	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Karimun	912,75
2.	Kabupaten Bintan	1.318,21
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037 adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Negara Vietnam dan Negara Kamboja
- Sebelah Timur : Negara Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Selatan : Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat : Negara Singapura, Negara Malaysia dan Provinsi Riau

Gambar 1.1 Peta Provinsi Kepulauan Riau



Luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel 1.2 Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Karimun	4.698,09
2	Kabupaten Bintan	102.964,08
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kabupaten Lingga	43.339,00
5	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
6	Kota Batam	3.675,25
7	Kota Tanjungpinang	149,13
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

Setelah terbitnya Undang–Undang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2002, Markas Besar TNI Angkatan Laut Dinas Hidro Oseanografi mengeluarkan rekapitulasi data jumlah pulau dimana Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2.408 buah pulau dengan jumlah yang bernama 1.350 pulau dan belum bernama sebanyak 1.058 pulau. Pada tahun 2007 dilakukan verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (Depdagri, Bakosurtanal, Departemen Kelautan dan Perikanan, Dishidros dan Pusat Bahasa) yang bertujuan untuk identifikasi data pulau-pulau yang belum bernama dan sudah bernama di masing-masing Provinsi Kepulauan Riau dengan dasar pengertian “Pulau” menurut UNCLOS 1982 adalah suatu area daratan yang terbentuk secara alamiah, dikelilingi air dan selalu berada diatas air pada saat air pasang. Hasil verifikasi Tim Nasional setelah ditambah Pulau Berhala terdapat 1.796 pulau yang sudah bernama, hal ini sesuai dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2014 tentang Wilayah Administrasi Pulau Berhala, dengan perincian terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Pulau di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Berpenghuni
1	Kota Batam	371	133
2	Kota Tanjungpinang	9	2
3	Kabupaten Bintan	241	48
4	Kabupaten Karimun	251	73
5	Kabupaten Natuna	392	62
6	Kabupaten Lingga	532	76
	Jumlah	1.796	394

Catatan: Data Pulau di Kabupaten Anambas masih bergabung dengan Natuna

Tabel 1.4 Jumlah Pulau Kecil Terluar di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pulau	Nama Pulau
1	Kabupaten Bintan	4	Pulau Berakit, Pulau Sentut, Pulau Bintan, Pulau Malang Berdaun
2	Kabupaten Karimun	2	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
3	Kabupaten Natuna	7	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
4	Kabupaten Kepulauan Anambas	5	Pulau Tokong Malang Biru, Pulau Damar, Pulau Mangkai, Pulau Tokong Nanas, Pulau Tokong Belayar,
5	Kota Batam	4	Pulau Tokong Hiu Kecil, Pulau Karimun Anak
	Jumlah	22	

Sumber: Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG), 2016

Perkembangan terakhir pulau di Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 125.1/4275/BAK, tanggal 12 Oktober 2015 perihal penyampaian data pulau, ada penambahan pulau di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 122 pulau. Di samping itu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 22 pulau-pulau kecil terluar.

Topografi wilayah Provinsi Kepulauan Riau terbagi menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu sebagai berikut.

**1. Wilayah Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera**

Pulau-pulau Lepas Pantai Timur Sumatera tersebar di Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga dan Kota Batam, ketinggiannya wilayah bervariasi antara 0 – 50 meter dpl, 50 – 200 m (paling dominan) dan di atas 200 meter, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Lingga (1.163 meter dpl). Kemiringan lereng yang dominan adalah 15 – 25% pada wilayah perbukitan, serta 25 – 40% dan di atas 40% pada wilayah pegunungan.

2. Wilayah Pulau-pulau di sebelah Timur Jauh

Pulau-pulau ini terletak di wilayah Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas pada perbatasan Laut Cina Selatan, seperti Pulau Anambas, Pulau Jemaja, Pulau Bunguran, Pulau Tambelan dan lain-lain. Kondisi morfologi, ketinggian dan kemiringan lereng wilayah secara umum menunjukkan kesamaan dengan pulau-pulau di Kabupaten Bintan, dengan puncak tertinggi terdapat di Gunung Ranai (1.035 meter dpl).

3. Wilayah Pulau-pulau di Bagian Tenggara dari Kepulauan Lingga-Singkep

Pulau-pulau ini membentuk jajaran sesuai arah struktur utama geologi di Kepulauan Riau berarah Barat Laut Tenggara. Kelompok pulau ini merupakan relik morfologi tua dengan topografi berupa bukit dan gunung.

4. Kelompok Pulau Batam, Rempang dan Galang

Gugusan pulau ini ditandai oleh bentang alam bergelombang sebagai sisa morfologi tua paparan tepian Benua Sunda.

c. Jumlah Penduduk

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada dasarnya merupakan pembangunan manusia sebagai subyek dan obyek pembangunan yang mencakup seluruh siklus hidup manusia. Manusia untuk selanjutnya dapat disebut sebagai penduduk yang dapat dibedakan atas jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), kelompok umur (anak, remaja, usia produktif dan non produktif, serta usia lanjut). Dimensi pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk. Kualitas penduduk tercermin dari tingkat kesejahteraan penduduk, yaitu tingkat kesehatan dan gizi, pendidikan, dan produktivitas. Kuantitas penduduk dikaitkan dengan jumlah dan laju pertumbuhannya. Sedangkan mobilitas penduduk merupakan refleksi dari perpindahan dan persebaran penduduk karena merespons pembangunan ekonomi.



Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2021, pada Desember 2021 sebanyak 2,082,785 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki di Provinsi Kepulauan Riau hasil SP2021 sebanyak 1,060,044 jiwa atau 51%. Jumlah penduduk perempuan di Provinsi Kepulauan Riau hasil SP2021 sebanyak 1,022,741 jiwa atau 49%.

Pada tahun 2021, rasio jenis kelamin penduduk provinsi Kepulauan Riau sebesar 104,16. Artinya terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Dengan luas daratan provinsi Kepulauan Riau sebesar 8,2 ribu km² maka kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 258,27 jiwa per km.

Penyebaran penduduk di Provinsi Kepulauan Riau masih terkonsentrasi di Kota Batam yakni pada tahun 2021 sebanyak 1,193,088 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 23.320 jiwa.

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2021

No	Kab/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
1	Karimun	133,351	127,269	260,620	104,91	259,45
2	Bintan	86.565	82.189	168,754	106,30	162,52
3	Natuna	42.310	40.346	82,656	105,78	83,36
4	Lingga	52,645	49,349	101,994	106,51	100,66
5	Kep. Anambas	24,596	23,320	47,916	107,01	48,74
6	Batam	606,062	587,026	1,193,088	103,83	1.230,10
7	Tanjungpinang	114,515	113,242	227,757	101,52	1.574,87
	Provinsi Kepri		1,022,741	2,082,785	104,16	2.118,24

Sumber: BPS Provinsi Kepri (Potret Sensus Penduduk 2021).

d. Jumlah Kabupaten/Kota

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau hampir 96% adalah lautan dan terdiri dari banyak pulau-pulau kecil. Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau terdapat dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, dan lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas.



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km².

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor 25.10/JKGG/IGD.01/08/2016 tanggal 25 Agustus 2016 perihal Klarifikasi Data Geografis Kabupaten/Kota, dengan mengambil data dari interpretasi Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000.

Tabel 1.6

Letak Astronomis Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/Kota	Lintang	Bujur
1.	Karimun	1°01'58,93" LU	103°22' 32,84" BT
2.	Bintan	1°05'03,94" LU	104°28' 56,23" BT
3.	Natuna	3°56'28,62" LU	108°22' 38,53" BT
4.	Lingga	0°12'36,24" LU	104°36' 18,79" BT
5.	Anambas	3°12'54,00" LU	106°13' 04,80" BT
6.	Batam	1°07'40,01" LU	104°03' 18,84" BT
7.	Tanjungpinang	0°57'56,48" LU	104°26' 27,62" BT

Sumber: Biro Pemerintahan dan Perbatasan

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 mengacu pada Perda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang terdiri atas 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan 43 Unit Kerja Perangkat Daerah di bawah OPD baik berupa Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas dan Badan maupun Cabang Dinas.

Tabel 1.7

**31 PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah UPT
1	DINAS TENAGA KERJA	2 UPT
2	DINAS PERHUBUNGAN	4 UPT
3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	6 UPT
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3 UPT
5	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	9 UPT
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	2 UPT



NO	PERANGKAT DAERAH	Jumlah UPT
7	SEKRETARIAT DAERAH	-
8	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	-
9	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-
10	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	2 UPT
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	2 UPT
12	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1 UPT
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	-
14	DINAS PENDIDIKAN	1 UPT 5 CABDIS
15	DINAS KEBUDAYAAN	5 CABDIS
16	DINAS ESDM	-
17	DINAS KESEHATAN	-
18	DINAS PARIWISATA	-
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	-
20	DINAS SOSIAL	1 UPT
21	DINAS PM DESA	-
22	DINAS PM DAN PTSP	-
23	BKPSDM	-
24	BAPERENLITBANG	-
25	BPBD	-
26	BADAN KESBANG	-
27	INSPEKTORAT	-
28	SATPOL PP	-
29	SEKRETARIAT DPRD	-
30	DINAS KOP UKM	-
31	DISPERINDAG	-

Sumber: Biro Organisasi dan Korpri Setda Provinsi Kepri

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan
Jenis Kelamin di Provinsi Kepulauan Riau Desember 2021

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Fungsional Tertentu	312	380	692
Fungsional Umum	623	627	1.250
Struktural	552	291	843
Eselon IV	359	226	585
Eselon III	152	59	211
Eselon II	40	6	46
Eselon I	1	-	1
Jumlah	1.487	1.298	2.785

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepri Desember 2021

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2021

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sampai dengan SD	1
2	SLTP/Sederajat	5
3	SMA/Sederajat	255
4	Diploma I, II/Akta I, II	7
5	Diploma III/Akta III/Sarjana Muda	446
6	Tingkat Sarjana/Diploma IV/Doktor/Ph.D	2.070
	Jumlah	2.784

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepri Desember 2021

Tabel 1.10 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Kepangkatan
dan Jenis Kelamin Provinsi Kepulauan Riau Per Desember 2021

Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1. I/A (Juru Muda)	0	-	0
2. I/B (Juru Muda Tingkat I)	1	-	1
3. I/C (Juru)	1	-	1
4. I/D (Juru Tingkat I)	1	-	1
Golongan I	3	-	3
5. II/A (Pengatur Muda)	8	2	10
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	33	18	51
7. II/C (Pengatur)	79	67	146
8. II/D (Pengatur Tingkat I)	112	92	204
Golongan II	232	179	411
9. III/A (Penata Muda)	126	136	262
10. III/B (Penata Muda Tingkat 1)	221	298	519
11. III/C (Penata)	340	321	661



Pangkat/Golongan/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
12. III/D (Penata Tingkat I)	281	254	535
Golongan III	968	1.298	3.073
13. IV/A (Pembina)	148	68	216
14. IV/B (Pembina Tingkat I)	90	37	127
15. IV/C (Pembina Utama Muda)	23	2	25
16. IV/D (Pembina Utama Madya)	22	3	25
17. IV/E (Pembina Utama)	-	-	-
Golongan IV	283	110	393
Jumlah	1.486	2.746	3.460

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepri Desember 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Realisasi APBD tahun 2021 yang diuraikan mencakup pendapatan daerah, pengelolaan belanja daerah, dan pengelolaan pembiayaan daerah, sebagai berikut :

Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah meliputi: 1). Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah; 2). Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. 3). Lain-lain Pendapatan yang Sah terdiri dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (BOS dan DID); Pendapatan Hibah; Pendapatan Dana Darurat; Tambahan Penghasilan Guru; dan Pendapatan Lainnya.

Total realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar 3.913.242.753.264,21 atau 101,53% dari target pendapatan daerah dalam APBD-P sebesar Rp.3.854.182.050.629,00. Seperti terlihat pada Tabel 1.11 dan Gambar 1.3 berikut ini.



Tabel 1.11
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

No	Uraian	Target APBD-P 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/Kurang
	PENDAPATAN	3.854.182.050.629,00	3.913.242.753.264,21	101,53	(11.004.331.733,80)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.165.900.404.289,80	1.194.383.104.731,60	102,44	28.482.700.441,80
	a. Pajak Daerah	1.074.270.326.530,00	1.191.202.760.957,00	90,18	116.932.434.427,00
	b. Retribusi Daerah	207.569.617.500,00	12.274.391.358,00	5,91	(195.295.226.142,00)
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	53.035.620.811,00	3.035.620.811,00	5,72	(50.000.000.000,00)
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	101.197.170.421,00	169.365.745.748,18	167,33	68.168.575.327,18
2.	Dana Perimbangan	2.346.098.375.158,00	2.362.162.625.533,00	99,32	16.064.250.375,00
	a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	404.642.197.668,00	449.866.817.186,00	89,95	45.224.619.518,00
	b. Dana Alokasi Umum	1.092.929.539.000,00	1.092.929.539.000,00	100,00	(00,00)
	c. Dana Alokasi Khusus (Fisik)	194.657.717.000,00	174.478.742.639,00	111,57	(20.178.974.363,00)
	d. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	653.868.921.490,00	644.887.526.708,00	101,39	(8.981.394.782,00)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.573.618.209,00	130.764.286.857,03	21,09	103.190.668.648,00
	a. Pendapatan Hibah	1.201.000.000,00	104.391.668.648,03	1,15	103.190.668.648,00
	b. Hibah PT Jasa Raharja	1.201.000.000,00	1.201.000.000,00	100,00	0,00
	c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	26.372.618.209,00	26.372.618.209,00	100,00	0,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah Provinsi Kepri berasal dari Dana Berimbang, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah, dan terakhir Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Kontribusi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebesar 99,32%. Pendapatan Asli Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah tahun 2021 sebesar 102,44%. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya berkontribusi sebesar 21,09% pada tahun 2021.



Penjelasan lebih rinci realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau masing-masing unsur pendapatan daerah sebagai berikut.

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp.1.194.383.104.731,60 atau 102,44% dari target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD-P sebesar Rp. 1.165.900.404.289,80 Lebih rinci tentang realisasi Pendapatan Asli Daerah dijelaskan sebagai berikut :

1) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari sektor Pajak Daerah melebihi target yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp.1.194.383.104.731,60 atau 102,44% dari target dalam APBD-P 2021 sebesar Rp. 1.165.900.404.289,80 Realisasi yang terbesar berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Jenis pajak daerah lainnya yaitu pajak rokok dan pajak air permukaan.

2) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp12.274.391.358 atau 5,91% dari target dalam APBD-P sebesar Rp207.569.617.500. Kontribusi Retribusi Daerah berasal dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pelayanan Kepelabuhan; Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Retribusi Pemanfaatan Ruang Laut-DKP; Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing; Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan Retribusi Izin Bidang Perhubungan.

3) Realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan daerah dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021. Realisasi Pendapatan sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang



Dipisahkan pada tahun 2021 sebesar Rp.3.035.620.811 atau 5,72% dari target dalam APBD-P sebesar Rp.53.035.620.811 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari perolehan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)

4) Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2021, dimana realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp.169.365.745.748,18 atau 167,36% dari target Pendapatan Asli Daerah dalam APBD-P 2021 sebesar Rp.101.197.170,421. Realisasi pendapatan terbesar berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau dan Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud Tanjung Uban. Unsur Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang lainnya berasal dari Jasa Giro Kas Daerah; Pendapatan Denda Pajak; dan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya. Perincian realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 tercantum pada Tabel 1.12 berikut ini.

Tabel 1.12
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

No	Uraian	Target APBD- P 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/Kurang
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.165.900.404.289,80	1.194.383.104.731,60	102,44	28.482.700.441,80
a.	Pajak Daerah	1.074.270.326.530,00	1.191.202.760.957,00	90,18	116.932.434.427,00
	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	404.500.000.000,00	454.241.348.534,00	89,05	49.741.348.534,00
	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	205.500.000.000,00	233.751.791.300,00	87,91	28.251.791.300,00
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	337.542810.330,00	372.016.603.675,00	90,73	34.473.793.345,00
	Pajak Air Permukaan	950.000.000,00	900.347.601,00	105,51	(49.652.399,00)
	Pajak Rokok	125.777.516.200,00	130.292.699.847,00	96,53	4.515.153.647,00



No	Uraian	Target APBD- P 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/Kurang
b.	Retribusi Daerah	207.569.617.500,00	12.274.391.358,00	5,91	(195.295.226.142,00)
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium	2.494.444.000,00	1.656.875.510,00	66,42	(837.568.490,00)
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	201.385.173.500,00	1.665.789.748,00,00	0,83	(199.719.383.752,00)
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	400.000.000,00	57.307.500,00	14,43	(343.692.500,00)
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	690.000.000,00	566.550.000,00	121,79	(123.450.000,00)
	Retribusi Izin Usaha Perikanan	1.000.000.000,00	1.514.264.000,00	66,03	514.264.000,00
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	1.600.000.000,00	6.813.604.600,00	25,48	5.213.604.600,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	53.035.620.811,00	3.035.620.811,00	5,72	(50.000.000.000,00)
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	101.197.170.421,00	169.365.745.748,18	59,75	68.168.575.327,18
	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	665.875.792,00	63.000.000,00	9,46	(602.875.792,00)
	Penerimaan Jasa Giro	8.000.000.000,00	4.620.403.927,88	57,75	(3.379.596.072,12)
	Pendapatan Denda Pajak	9.031.294.629,00	9.810.791.854,00	108,63	779.497.224,00
	Pendapatan BLUD	83.500.000.000,00	147.967.219.368,86	177,21	64.467.219.368,86
	Penerimaan Lain-lain	0	6.454.157.506,54	0	6.454.157.506,54

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.



b. Realisasi Dana Perimbangan

Pada tahun 2021 dana perimbangan dari Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp2.346.098.375.158,00 dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp2.362.162.625.533,00 dengan persentase capaian sebesar 100,68%, seperti terlihat pada Tabel 1.13 berikut ini.

Tabel 1.13
Realisasi Dana Perimbangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021

No	Uraian	Target APBD-P 2021	Realisasi 2021	%	Lebih/Kurang
2.	Dana Perimbangan	2.346.098.375.158,00	2.362.162.625.533,00	98,30	16.064.250.375,00
a.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	404.642.197.668,00	449.866.817.186,00	89,95	45.224.619.518,00
b.	Dana Alokasi Umum	1.092.929.539.000,00	1.092.929.539.000,00	100,00	0
c.	Dana Alokasi Khusus (Fisik)	194.657.717.000,00	174.478.742.639,00	111,57	(20.178.974.363,00)
d.	Dana Alokasi Khusus (Non Fisik)	653.868.921.490,00	644.887.526.708,00	101,39	(8.981.394.782,00)
e.	Dana Insentif Daerah (DID)	44.437.322.000,00	44.437.322.000,00	100,00	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Penjelasan rincian atas realisasi pendapatan masing-masing komponen Dana Perimbangan sebagai berikut :

1) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Realisasi pendapatan bagi hasil pajak/Bukan pajak sebesar Rp449.866.817.186,00 atau 89,95% jika dibandingkan target APBD-P Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp404.642.197.668,00. Komponen Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan, Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Dana Bagi Hasil Non Pajak terdiri atas bagi hasil provisi sumber daya hutan, Dana Reboisasi, Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent), Hasil



Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti), Royalti pertambangan dan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi.

2) **Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum direncanakan dalam APBD-P tahun 2021 sebesar Rp1.092.929.539.000,00 dengan realisasi mencapai sebesar Rp1.092.929.539.000,00 atau capaian sebesar 100%.

3) **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus ditargetkan dalam APBD-P 2021 sebesar Rp848.526.638.490,00 dengan realisasi sebesar Rp819.366.269.347,00 atau capaian sebesar 96,56%. Jenis DAK dengan anggaran paling besar pada tahun 2021 adalah DAK Non Fisik (Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Tunjangan Profesi Guru, Dana Tambahan Penghasilan Guru, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan). Jenis DAK lainnya yaitu DAK Fisik Reguler, selanjutnya DAK Fisik Penugasan, dan DAK Fisik Afirmasi.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2021, capaian realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp130.764.286,03 atau 0,47% dari target APBD-P sebesar Rp27.573.618.209,00. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri serta Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Secara rinci realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2021 tercantum pada Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 1.14 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	Uraian	Target APBD- P 2021	Realisasi 2021	%	Lebih /Kurang
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	27.573.618.209,00	130.764.286,03	0,47	103.190.668.648,00
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	1.201.000.000,00	1.201.000.000,00	100,00	0,00
	Pendapatan atas Pengembalian Hibah	26.372.618.209,00	26.372.618.209,00	100,00	0,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



B. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi dan belanja langsung. Unsur belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, sementara itu belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp3.790.372.856.244 (96,73%) dari alokasi belanja dalam APBD-P 2021 sebesar Rp3.918.696.016.772,00. Secara rinci realisasi belanja daerah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.15 berikut ini.

Tabel 1.15

Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	APBD-P 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
	Belanja	3.918.696.016.772,00	Rp3.790.372.856.244	96,73
1.	Belanja Operasi	2.940.216.706.381,00	2.851.662.214.099,14	96,98
a.	Belanja Pegawai	974.785.005.540,00	839.504.488.559,00	86,12
2.	Belanja Langsung	2.422.861.732.439,00	2.288.236.963.162,00	94,44
a.	Belanja Barang dan Jasa	1.444.382.422.048,00	1.349.526.321.016,14	97,48
	Belanja Hibah	519.604.760.476,00	509.719.402.436,00	98,03
	Belanja Bantuan Sosial	1.444.518.317,00	1.040.750.000,00	96,96
b.	Belanja Modal	377.456.745.376,00	344.412.534.992,60	91,25
	Belanja Modal Tanah	49.100.000.000,00	49.907.135.952,00	101,64
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	152.756.458.532,00	141.941.859.742,18	92,92
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.348.419.053,00	60.829.963.310,12	82,93
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	100.439.987.801,00	91.672.379.313,30	91,27
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.581.879.990,00	849.662.675,00	53,71
	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	230.000.000,00	211.574.000,00	91,99
c.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa	553.868.004.567,00	561.664.084.903,00	101,41
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten /Kota dan Pemerintahan Desa	18.700.000.000,00	13.500.000.000,00	72,19
d.	Belanja Tidak Terduga	28.454.560.448,00	19.134.022.250,00	67,24

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Realisasi Belanja Operasi Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebesar Rp. 2.851.662.214.099,14 atau 94,44% dari alokasi Belanja Operasi dalam APBD-P 2021 sebesar Rp2.940.216.706.381,00.

Realisasi belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 didominasi oleh belanja langsung dengan proporsi sebesar 94,44%, Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa mencapai 101,41%. sedangkan Belanja Pegawai sebesar 86,12,0% dan Belanja Hibah sebesar 98,03%, belanja Bansos sebesar 96,96% dan untuk Belanja Tidak Terduga realisasinya 67,24%. Realisasi Belanja Langsung pada tahun 2021 sebesar Rp.2.288.236.963.162,00 atau 97,30% dari alokasi Belanja Langsung dalam APBD-P 2021 sebesar Rp1.885.966.611.793,09. Realisasi unsur Belanja Langsung untuk Belanja Pegawai sebesar 95,73%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 97,48%, dan Belanja Modal sebesar 97,42%.

C. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah tahun 2021 dari Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (Tahun 2021) sebesar Rp66.513.966.142,81. Dengan demikian Pembiayaan netto sebesar Rp66.513.966.142,81.

Secara rinci realisasi pembiayaan daerah tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.16 berikut ini.

Tabel 1.16

Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No	Uraian	Tahun 2021		
		APBD-P 2021 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)	%
	Pembiayaan Daerah			
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	66.513.966.142,81	66.513.966.142,81	100,00
a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.513.966.142,81	66.513.966.142,81	100,00
b.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.513.966.142,81	66.513.966.142,81	100,00
	Pembiayaan Netto	66.513.966.142,81	66.513.966.142,81	100,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Perumusan masalah sebagai isu strategis Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan pendekatan teknokratik yang bersumber dari tiga (3) aspek penting, yaitu: (1) Hasil Evaluasi capaian indikator RPJMD tahun 2021, (2) rumusan isu strategis berdasarkan hasil Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, dan (3) isu nasional dan arah kebijakan prioritas (RKP) 2021. Sehingga dapat dirumuskan 6 (enam) permasalahan strategis berikut :

1. Kualitas sumberdaya manusia yang masih relatif rendah;
2. Pertumbuhan investasi yang rendah dan belum mengarah pada investasi di bidang kemaritiman dan pariwisata;
3. Daya saing produk dan jasa usaha ekonomi yang masih rendah;
4. Lambatnya pengembangan Kepri sebagai Pusat Kebudayaan melayu;
5. Kurangnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah;
6. Inovasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi yang belum maksimal.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi

Tahun 2021 merupakan tahun transisi, dimana penyusunan dokumen RKPD masih mengacu pada dokumen perubahan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga dalam LPPD Tahun 2021 ini yang digunakan adalah visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Periode Tahun 2016-2021 yang termuat didalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yakni: ***"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"***.

Misi

Perwujudan visi tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu.



2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme Sumber Daya Manusia sehingga memiliki daya saing tinggi.
4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan
6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah.
7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal.
8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

c. Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan

Program dan kegiatan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD dan RKPD Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas 40 urusan, dimulai dari urusan Pendidikan, Kesehatan, hingga urusan Program Rutin untuk setiap Perangkat Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendidikan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Kegiatan Dana Alokasi DAK Reguler SMA



- 7) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 9) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 10) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 11) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 12) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 15) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 16) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 17) Penyediaan Bahan/Material
- 18) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 20) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 21) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 22) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 23) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 24) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 25) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 26) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
- 27) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

b) Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Penambahan Ruang Kelas Baru
- 2) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 3) Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi
- 4) Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika
- 5) Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia
- 6) Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer
- 7) Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa
- 8) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah



- 9) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 10) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 11) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- 12) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- 13) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi
- 14) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika
- 15) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia
- 16) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer
- 17) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- 18) Rehabilitasi Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 19) Pengadaan Mebel Sekolah
- 20) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 21) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- 22) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
- 23) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 24) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 25) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- 26) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
- 27) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
- 28) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
- 29) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- 30) Pembangunan Ruang Praktik Siswa
- 31) Pembangunan Ruang Laboratorium
- 32) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- 33) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- 34) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
- 35) Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa
- 36) Pengadaan Mebel Sekolah
- 37) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- 38) Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
- 39) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik



- 40) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan
- 41) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 42) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 43) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- 44) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
- 45) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
- 46) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
- 47) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
- 48) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
- 49) Pengadaan Mebel Sekolah
- 50) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
- 51) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- 52) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- 53) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus
- 54) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
- 55) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
- 56) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus

c) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 2) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 6) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 7) Penyediaan Bahan/Material
- 8) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 9) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 10) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- 12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Kesehatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan Dinas Kesehatan meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- 7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- 8) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- 3) Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 10) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 11) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan



- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
- 13) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 14) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
- 15) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
- 16) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus
- 17) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 18) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 19) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
- 20) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- 21) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 22) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.
- 2) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

UNIT RUMAH SAKIT PROVINSI KEPRI TANJUNG UBAN

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya



- 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 15) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 17) Pemeliharaan Mebel
- 18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 19) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 20) Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- 21) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 22) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- 3) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
- 4) Pengadaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
- 5) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
- 6) Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 10) Operasional Pelayanan Rumah Sakit



- 11) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
- 12) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- 13) Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- 2) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan pada program ini meliputi : :

- 1) Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
- 2) Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
- 3) Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
- 4) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
- 5) Normalisasi/Restorasi Sungai
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
- 7) Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan

b. Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 2) Pembangunan Jalan
- 3) Rehabilitasi Jalan
- 4) Pemeliharaan Rutin Jalan
- 5) Pembangunan Jembatan



- 6) Pemeliharaan Rutin Jembatan

c. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
- 2) Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
- 3) Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
- 4) Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 5) Kegiatan Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi
- 6) Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
- 7) Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi

d. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
- 2) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
- 4) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

4. Pertanahan

a. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.



- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 9) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 10) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 11) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 12) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 13) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 14) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 15) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 16) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 17) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 18) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 19) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 20) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
- 21) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- 22) Pengadaan Aset Tetap Lainnya.
- 23) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 24) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 25) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 26) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 27) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 28) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
- 29) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 30) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Pengembangan Perumahan

Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan.



- 2) Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani.
- 3) Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
- 4) Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana

c. Program Kawasan Permukiman

Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan pada program ini sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman.

6. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

a) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum
- 2) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- 3) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 4) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
- 5) Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

b) Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran didukung

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyediaan dan pemukhtahiran informasi daerah rawan kebakaran dan peta rawan kebakaran

7. Sosial

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi

c. Program Rehabilitasi Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Pant
- 2) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Pant
- 3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Pant
- 4) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Pant

d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi

e. Program Penanganan Bencana

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Kegiatan prioritas pada program ini yang dilaksanakan meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi



8. Tenaga kerja

a. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 7) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 8) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 10) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 11) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 12) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 14) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 3) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 10) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**c. Program Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 2) Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
- 3) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 5) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
- 6) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)

d. Program Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengawasan Pelaksanaan Norma kerja di Perusahaan
- 2) Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
- 3) Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
- 4) Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan

e. Program Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

9. Transmigrasi**a. Program Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Transmigrasi**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi

b. Program Pengembangan Satuan Pemukiman pada Tahap Pemantapan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penguatan Infrastruktur Sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka pemantapan satuan pemukiman

10. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak**a. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**

Kegiatan pada program ini meliputi:



- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

b. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi
- 2) Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- 3) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
- 4) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
- 2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota

d. Program Perlindungan Khusus Anak

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

e. Program Perlindungan Perempuan

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:



- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- 2) Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
- 3) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
- 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
- 6) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 7) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

f. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- 2) Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB
- 3) Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)

11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Program Pengendalian Penduduk

Kegiatan prioritas pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi

12. Pangan

a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan.
- 2) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.



- 4) Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

b. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

c. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi.

13. Pertanian

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.
- 2) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura.
- 3) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan.
- 4) Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian.
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penjaminan Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
- 2) Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- 3) Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

d. Program Penyuluhan Pertanian



Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
- 2) Pengembangan Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani.

14. Lingkungan hidup

e. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

f. Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.
- 2) Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan.

h. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.

i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi

k. Program Pengelolaan Persampahan



Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional

15. Kehutanan

1) Program Pengelolaan Hutan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi.
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi.
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan.
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan / Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 5) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m³/Tahun.

2) Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.

16. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Program Pendaftaran Kependudukan

Kegiatan pada Program ini meliputi:

1. Kegiatan Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk
2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk.

b. Program Pencatatan Sipil

Kegiatan pada Program ini meliputi:

1. Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan pada Program ini meliputi:

1. Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan pada Program ini meliputi:

1. Kegiatan penyediaan data Kependudukan Provinsi.



17. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a. Program Penataan Desa

1. Kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa adat; / Fasilitas Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa;

b. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan pada program ini yakni:

1. Fasilitas Evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan.
2. Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan.
3. Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa.

c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan pada program ini yakni:

1. Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
3. Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa.
4. Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemamfaatan Teknologi Tepat Guna.
5. Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga.

18. Perhubungan

a. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

c. Program Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 2) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Program Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 2) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

e. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

f. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Pengadaan Mebel
- 9) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 10) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 20) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
- 21) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
- 22) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi
- 23) Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi
- 24) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
- 25) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 26) Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi
- 27) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi
- 28) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi



- 29) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut.
- 30) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
- 31) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 32) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
- 33) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- 34) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- 35) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

19. Komunikasi & Informatika

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar.
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 5) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 7) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 11) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik.
- 2) Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik.
- 3) Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- 4) Pelayanan Informasi Publik.
- 5) Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan.
- 6) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah.
- 7) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan.
- 8) Kemitraan Komunitas.

c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- 2) Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- 3) Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah.
- 4) Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 5) Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.
- 6) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

20. Statistik

a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral

21. Persandian

a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi



Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- 2) Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

22. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 2) Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- 3) Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat.
- 2) Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Terbentuknya Koperasi yang kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel.
- 3) Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat.

c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi.
- 2) Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi.

d. Program Pendidikan dan Latihan Koperasi

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:



- 1) Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.
- 2) Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha.

f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan

g. Program Pengembangan UMKM

Kegiatan pada program ini meliputi sebagai berikut:

- 1) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia serta Desain dan Teknologi.

23. Penanaman Modal

a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
- 2) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi

b. Program Promosi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
- 2) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 2) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- 3) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan



- 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

24. Kepemudaan dan olah raga

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi
- 3) Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
- 4) Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi
- 5) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi
- 3) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi



- 4) Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event
- 5) Pengembangan Organisasi Keolahragaan

25. Kebudayaan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN.
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 11) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengembangan Kebudayaan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- 2) Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan



- 3) Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
- 4) Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

c. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan pada program ini terdapat 1 (satu) kegiatan, namun setelah mengalami *Refocusing* Anggaran pada Program dan Kegiatan ini dihapuskan.

d. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan pada program ini yakni Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi

e. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penetapan Cagar Budaya
- 2) Pelindungan Cagar Budaya
- 3) Pengembangan Cagar Budaya

f. Program Pengelolaan Permuseuman

Kegiatan pada program ini yakni Pelindungan , Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu



26. Perpustakaan

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik.
- 2) Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi.
- 3) Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi.
- 4) Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- 5) Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi.
- 6) Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
- 7) Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- 8) Pengembangan Perpustakaan Deposit.
- 9) Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka.
- 10) Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi.
- 11) Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat.
- 12) Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno.
- 2) Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan.
- 3) Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara.



27. Kearsipan

a. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
- 2) Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi
- 3) Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis.
- 4) Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN.
- 5) Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun.

28. Kelautan dan Perikanan

a. Program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Operasional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang
- 2) Pelaksanaan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan
- 3) Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Tangkap
- 4) Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Antang
- 5) Pengelolaan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil
- 6) Pengembangan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan
- 7) Pengembangan Kapal Perikanan
- 8) Pengembangan Sarana Prasarana Pelabuhan Perikanan
- 9) Dukungan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan



- 10) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Karimun
- 11) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Natuna
- 12) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Lingga
- 13) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 14) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan di Kota Batam
- 15) Pembangunan Rumah Singgah Nelayan Kabupaten/ Kota
- 16) Kegiatan Pengadaan Jaring dan Keramba Apolo
- 17) Rencana Pembangunan Induk Pelabuhan Perikanan, Kabupaten Lingga
- 18) Dukungan Anggaran Kelompok Nelayan
- 19) Bantuan BBM Nelayan
- 20) Pembangunan Tempat Pelelangan Ikan Batu Licin, Kabupaten Bintan
- 21) Pengadaan Alat Tangkap Nelayan Jaring Tenggiri
- 22) Alat Tangkap Kapal dengan Bobot 3-5 GT Kabupaten Natuna
- 23) Pembangunan Gudang Barang pada Pelabuhan Ikan di Kabupaten Natuna
- 24) Rutinitas Kantor UPTD Balai Pelabuhan Perikanan Pantai
- 25) Pengadaan Keramba Apung untuk Kelompok Nelayan Se-Provinsi Kepri
- 26) Hibah Pengadaan Sampan Mesin Ketingting Nelayan Se-Kepri
- 27) Pengadaan Lampu Air Garam bagi Masyarakat Kepulauan, Masyarakat Terpencil dan Nelayan di Provinsi Kepri
- 28) Pengadaan Kapal Pompong 7 GT untuk Kelompok Nelayan Kab. Kepulauan Anambas
- 29) Pengadaan Pompong Nelayan Kecamatan Se-Kabupaten Natuna

b. Program pengembangan dan pengelolaan Perikanan Budidaya



Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan Pelaku Usaha Perikanan Budidaya
- 2) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
- 3) Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan
- 4) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan
- 5) Pengembangan Budidaya Rumput Laut
- 6) Peningkatan Kapasitas Unit Perbenihan (UPTD Provinsi BBI Pengujan)
- 7) Peningkatan Mutu Benih dan Sistem Budidaya Ikan
- 8) Dukungan Penyediaan Benih Ikan Laut di Balai Benih Ikan di Provinsi Kepri
- 9) Alat Pembuat Pakan Kabupaten Natuna

c. Program Penguatan Daya Saing Hasil Perikanan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pembinaan Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- 2) Sarana dan Prasarana Hasil Perikanan
- 3) Promosi dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- 4) Pengadaan Mesin Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kabupaten Lingga

d. Program Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Operasional UPTD Balai Pengujian Mutu dan Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan (BPMPPKP)
- 2) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
- 3) Pengembangan Sistem Jaminan Mutu Hasil Perikanan

e. Program Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)

**f. Program Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan**

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengawasan dan Penertiban Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 2) Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- 3) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Karimun
- 4) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Natuna
- 5) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lingga
- 6) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 7) Pelaksanaan Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Kota Batam
- 8) Pelaksanaan Program COREMAP CTI

g. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pendamping Perikanan Lapangan
- 2) Pengembangan Sumberdaya Manusia

29. Pariwisata**a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 3) Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi



- 5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
- 6) Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi
- 7) Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata

b. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 2) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri
- 3) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
- 4) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata

c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
- 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar
- 3) Pengembangan Sistem Pemasaran
- 4) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan



- 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
- 3) Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan
- 4) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
- 5) Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

30. Energi dan Sumber Daya Mineral

a. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian

Kegiatan dan Sub Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
- 2) Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah

b. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara

Kegiatan pada program ini yakni Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil.

c. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
- 2) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi



- 3) Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
- 4) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen
- 5) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi
- 6) Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu;
- 7) Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 8) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
- 9) Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

d. Program Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan dan Konversi Energi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi
- 2) Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi
- 3) Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi

31. Perdagangan

a. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pameran Dagang Internasional/Nasional.
- 2) Misi Dagang bagi Produk Unggulan Ekspor.
- 3) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor.



b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota.

c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Kegiatan pada program ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi.

d. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan pada program ini meliputi:

- i. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen.
- ii. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar/atau Jasa sesuai Parameter ketentuan Perlindungan Konsumen.

e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi

32. Perindustrian

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi.
- 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri.
- 3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri.



- 4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.
- 5) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

b. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

33. Fungsi Perencanaan Pembangunan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 9) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- 11) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 12) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 13) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 14) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 15) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan



- 16) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 17) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 18) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 19) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 20) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 21) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 22) Penyediaan Bahan/Material
- 23) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 24) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 25) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- 26) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 27) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 28) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 29) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 30) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 31) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 32) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 33) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 34) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 35) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 36) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 37) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- 38) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah



Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
- 2) Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
- 3) Pelaksanaan Konsultasi Publik
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
- 5) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
- 6) Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- 7) Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 8) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD
- 9) Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- 10) Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi
- 11) Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
- 12) Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
- 13) Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- 14) Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

c. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan



- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
- 4) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
- 5) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 6) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 7) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 8) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
- 9) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 10) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 11) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
- 12) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
- 13) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 14) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 15) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
- 16) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA



- 17) Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
- 18) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 19) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- 20) Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

34. Fungsi Penelitian dan Pengembangan

a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- 2) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- 3) Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
- 4) Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
- 5) Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan
- 6) Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
- 7) Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
- 8) Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
- 9) Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- 10) Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika
- 11) Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
- 12) Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- 13) Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual



35. Fungsi Keuangan Daerah

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 4) Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 5) Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 6) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 7) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 8) Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 9) Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
- 10) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 11) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 12) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 14) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 15) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 16) Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 17) Kegiatan Pengadaan Mebel
- 18) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 19) Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- 20) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 21) Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 22) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 23) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 24) Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 25) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 26) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 27) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
- 2) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
- 4) Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD
- 5) Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
- 6) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- 7) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- 8) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- 9) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.



- 10) Kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi.
- 11) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota.
- 12) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- 13) Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.
- 14) Kegiatan Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.
- 15) Kegiatan Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah.
- 16) Kegiatan Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- 17) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah.
- 18) Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
- 19) Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya.
- 20) Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
- 21) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)



- 22) Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait.
- 23) Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
- 24) Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah.
- 25) Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
- 26) Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- 27) Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi.
- 28) Kegiatan Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- 29) Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi.
- 30) Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
- 31) Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
- 32) Kegiatan Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi.
- 33) Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah.
- 34) Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi.

c. **Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Penyusunan Standar Harga.
- 2) Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
- 3) Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah



- 4) Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah
- 5) Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 6) Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah
- 7) Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah
- 8) Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 9) Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah.
- 10) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

SUB UNIT ORGANISASI: UPT DANA BERGULIR

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban.
- 2) Sub Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3) Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah



SUB UNIT ORGANISASI: UPT PEMBERDAYAAN DAN PEMANFAATAN ASET

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 1) Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- 2) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 3) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 4) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7) Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 9) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 10) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 11) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 12) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 13) Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

36. Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN



- 5) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 11) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 12) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 15) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 17) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 19) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- 3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- 4) Pengelolaan Data Kepegawaian
- 5) Pengelolaan Mutasi ASN
- 6) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- 7) Pengelolaan Promosi ASN
- 8) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- 9) Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN



- 10) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- 11) Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- 12) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- 13) Evaluasi Disiplin ASN

c. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
- 2) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah
- 3) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
- 4) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

37. Sekretariat DPRD

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 5) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 6) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 7) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 8) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 9) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD



- 10) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 11) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 12) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 14) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 15) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 18) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 19) Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
- 20) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 21) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
- 22) Fasilitas Fraksi DPRD
- 23) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD

b. Program Dukungan pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Perda
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
- 4) Fasilitas Penyusunan Naskah Akademik
- 5) Pembahasan APBD
- 6) Bimbingan Teknis DPRD
- 7) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 8) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
- 9) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 10) Pelaksanaan Reses

38. Sekretariat Daerah

a. Biro Pemerintahan dan Perbatasan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 6) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 8) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya .
- 9) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 10) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 11) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 12) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 13) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan
- 2) Fasilitas Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- 3) Fasilitas Penataan Wilayah
- 4) Pelaksanaan Otonomi Daerah
- 5) Fasilitas Administrasi Kepala Daerah dan DPRD
- 6) Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan
- 7) Fasilitas Kerjasama Antar Pemerintah
- 8) Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta
- 9) Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

b. Biro Hukum

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



- b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- f) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- i) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- j) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- k) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- l) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- m) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2) Program Bantuan Hukum

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan
- b) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan
- c) Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya
- d) Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
- e) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum
- f) Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM

c. Biro Administrasi Pembangunan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



6. Pengadaan Mebel
7. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14. Pengadaan Mebel
15. Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
19. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD
22. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN
23. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
24. Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
25. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
26. Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah

d. Biro Administrasi Layanan Pengadaan

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- c) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



- e) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- f) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- g) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- h) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i) Fasilitas Kunjungan Tamu
- j) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- k) Pengadaan Mebel
- l) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
- m) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- n) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- o) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- p) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- q) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- r) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
- s) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- t) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa

Kegiatan pada program ini meliputi :

- a) Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa
- b) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
- c) Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d) Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik
- e) Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- f) Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa
- g) Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa
- h) Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa
- i) Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

**e. Biro Umum****1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan pada program ini meliputi:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- d. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
- e. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- g. Pengelolaan dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan
- h. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- i. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- j. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
- l. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- m. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- n. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- o. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- p. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
- q. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- r. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
- s. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- t. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- u. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- v. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- w. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- x. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- y. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- z. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- aa. Fasilitas Kunjungan Tamu
- bb. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- cc. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- dd. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- ee. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- ff. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- gg. Pengadaan Mebel
- hh. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- jj. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- kk. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ll. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- mm. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- nn. Pemeliharaan Mebel
- oo. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- pp. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
- qq. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- rr. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- ss. Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



- tt. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- uu. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- vv. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- ww. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- xx. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

f. Biro Kesejahteraan Rakyat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD.
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 6) Fasilitasi Kunjungan Tamu.
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 8) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
- 9) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
- 10) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual.
- 2) Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual.
- 3) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan.
- 4) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan.



- 5) Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial.
- 6) Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

g. Biro Administrasi Perekonomian

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 2) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- 3) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Pengadaan Mebel
- 11) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 12) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 13) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 14) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 15) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- 16) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan.
- 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 18) Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum
- 19) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro
- 20) Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro
- 21) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.
- 22) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup.
- 23) Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
- 24) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha.
- 25) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi.
- 26) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

h. Biro Organisasi dan Korpri

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- yy. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- zz. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- aaa. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- bbb. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ccc. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- ddd. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- eee. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- fff. Pengadaan Mebel



ggg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor

hhh. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

iii. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2) Program Penataan Organisasi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi
- b. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota
- c. Penataan Analisa Jabatan
- d. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- e. Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja
- f. Pengelolaan tatalaksana pemerintah
- g. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

3) Program Kepegawaian Daerah

Kegiatan pada program ini adalah Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

i. Biro Humas, Protokol dan Penghubung

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan pada program ini meliputi:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 3) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- 4) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- 5) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 6) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 9) Penyediaan Bahan/Material
- 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 11) Pengadaan Mebel
- 12) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



- 13) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 14) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 15) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 16) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 17) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 18) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 19) Penyiapan Materi Pimpinan
 - 20) Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - 21) Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan
 - 22) Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara
 - 23) Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 24) Pengelolaan Hubungan Keprotokolan
2. **Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**
Kegiatan pada program ini meliputi:
 - 1) Fasilitas Kerjasama antar Pemerintah.
 - 2) Fasilitas Kerjasama Badan Usaha/Swasta.
 3. **Program Pelayanan Penghubung**
Kegiatan pada program ini meliputi:
 - 1) Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat.
 - 2) Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya.
 - 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung.

39. Fungsi Pengawasan

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- 3) Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten / Kota



- 4) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- 5) Reviu Laporan Kinerja
- 6) Reviu Laporan Keuangan
- 7) Kerjasama Pengawasan Internal
- 8) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- 9) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan pada program ini meliputi :

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan
- 2) Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan
- 3) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakkan Integritas
- 4) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- 5) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 6) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah

40. Program Rutin Pada Perangkat Daerah

Selain program-program pembangunan, setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan beberapa program penunjang sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia



Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Penyusunan Laporan Keuangan perangkat daerah.

d. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:
Monitoring Opini dan Aspirasi Publik. Pengelolaan Konten dan Perencanaan, Media Komunikasi Publik. Pengelolaan Media Komunikasi Publik. Pelayanan Informasi Publik. Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

e. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat daerah dan dokumen perencanaan pembangunan.

f. Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini antara lain:
Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.

1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimum

Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,



pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditekankan untuk melaksanakan SPM sebagai urusan wajib pemerintahan dengan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan, ketentuan lebih lanjut SPM bidang urusan pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Kesehatan, ketentuan lebih lanjut SPM urusan kesehatan adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, ketentuan lebih lanjut SPM Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.



4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, ketentuan lebih lanjut SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sama dengan SPM PU di atas.
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, ketentuan teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 pada SubBidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
6. Sosial, ketentuan lebih lanjut SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Selain diatur kementerian terkait, penerapan SPM juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 khususnya bagi pemerintah daerah terkait dengan struktur, mekanisme, jenis, dan mutu pelayanan yang menjadi hak warga negara.

Setiap SPM memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan Peraturan Pemerintah ini maksudkan agar terjaminnya hak masyarakat untuk menerima suatu pelayanan



dasar dari pemerintahan daerah dengan mutu tertentu, menjadi alat untuk menentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan dasar, sehingga SPM dapat menjadi:

- a. Dasar menentukan kebutuhan pembiayaan daerah, menjadi landasan dalam menentukan perimbangan keuangan dan/atau bantuan lain yang lebih adil dan transparan, menjadi dasar dalam menentukan anggaran kinerja berbasis manajemen kinerja.
- b. SPM dapat dijadikan dasar dalam alokasi anggaran daerah dengan tujuan yang lebih terukur.
- c. SPM dapat menjadi alat untuk meningkatkan akuntabilitas Pemerintahan Daerah terhadap masyarakat.

Sebaliknya, masyarakat dapat mengukur sejauhmana pemerintahan daerah dapat memenuhi kewajibannya dalam menyediakan pelayanan publik, memperjelas tugas pokok pemerintahan daerah dan mendorong terwujudnya *checks and balances* yang efektif serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan hingga tahun 2021. Untuk menjamin pelaksanaan SPM dapat dikawal dan berjalan dengan baik maka indikator SPM dituangkan dalam indikator program RPJMD 2016-2021, yang kemudian indikator-indikator tersebut dibagikan ke Organisasi Perangkat Daerah Pengampu sesuai kewenangannya.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada



peraturan/keputusan menteri yang membidangi masing-masing urusan. Rencana pencapaian SPM kemudian dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan di daerah.

Capaian kinerja makro Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n	Perubahan
1	Indeks Pembangunan Manusia	75,59	75,79	0,265
2	Angka Kemiskinan	6,13	5,75	0,38
3	Angka Pengangguran	10,34	9,91	-4,159
4	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	3,8	10,787
5	Pendapatan per kapita (Jutaan)	113,39	134,11	18,273
6	Ketimpangan Pendapatan	0,337	0,339	0,593

Indikator kinerja makro pertama adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2020 IPM Provinsi Kepulauan Riau sebesar 75,59 % dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 75,79 % dengan capaian kinerja tahun 2021 sebesar 0,26 %. Poin kedua adalah kemiskinan yang diukur dengan angka kemiskinan, dimana pada tahun 2020 angka kemiskinan mencapai 6,13 % dan mengalami penurunan menjadi 5,75 % dengan demikian angka kemiskinan menurun sebesar 0,38 %.



Indikator kinerja makro ekonomi ke-3 adalah pengangguran di daerah, pada tahun 2020 tingkat pengangguran mencapai 10,34 % kemudian tahun 2021 menjadi 9,91 % dengan demikian selama tahun 2021 meningkat sebesar 0,43 %. Hal ini tercermin dari kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -3,80 % menjadi -3,43 % di tahun 2021 dengan demikian pertumbuhan ekonomi Tahun 2021 mengalami kontraksi hingga -8,64%.

Indikator kinerja makro ekonomi ke-5 adalah pendapatan perkapita dimana pada tahun 2020 sebesar Rp. 122,24 juta sedangkan tahun 2019 adalah sebesar Rp. 116,45 juta dengan demikian walaupun perekonomian secara keseluruhan mengalami penurunan tetapi pendapatan perkapita mengalami kenaikan. Adapun indikator kinerja makro ekonomi terakhir adalah ketimpangan pendapatan dimana tahun 2020 sebesar 0,334 kemudian tahun 2021 menjadi 0,339 sehingga kesenjangan pendapatan masyarakat di Kepulauan Riau semakin melebar.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/SLTA Negeri terakreditasi	78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi	
	(Pendidikan Menengah)	Jumlah peserta didik sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	599		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemda	486	Kepulauan Riau	
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	12052		
		Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	10934		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	740		
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	534		
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	3348		
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	2329		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	193		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	0		
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta)	1047		
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta)	696		
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	1421	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	823	Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah kepala sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	145		
		Jumlah kepala sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	106		
		Jumlah tenaga laboratorium pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	11		
		Jumlah tenaga laboratorium/ bengkel/workshop pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	5		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah atas (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	837		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah kejuruan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	526		
	(Pendidikan Khusus)	Jumlah satuan pendidikan khusus yang terakreditasi (Negeri dan Swasta)	6		
		Jumlah peserta didik pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah peserta didik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	450	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	267		
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	255		
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)			
		Jumlah tenaga kependidikan pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta)	74		
		Jumlah pendidik pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	51		
		Jumlah kepala sekolah pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1), sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	14		
		Jumlah tenaga penunjang lainnya pada pendidikan khusus (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	51		
2	Kesehatan	Jumlah RS Rujukan provinsi yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	6		
		Jumlah Dukungan logistik kesehatan yang tersedia	21		
		Jumlah pos kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	8		
		Jumlah SDM kesehatan di pos kesehatan bagi penduduk terdampak	299		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi			
		Jumlah SDM kesehatan yang tergabung dalam tim penanggulangan krisis kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	69	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah kegiatan edukasi pengurangan resiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	8		
		Jumlah dukungan logistic Kesehatan yang tersedia	21		
		Jumlah SDM Kesehatan yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat Provinsi	69		
		Jumlah pelaksanaan kajian epidemiologi terhadap data/informasi tentang kemungkinan KLB lintas Kabupaten/Kota	8		
3	Pekerjaan Umum dan	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	81,46	Dinas PU Provinsi Kepulauan Riau	
	Penataan Ruang	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	614,5		
	(Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir)	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	0	Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau	
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	247,37		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi	1		
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi	1		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi	3		
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan provinsi (ha)	0		
		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan provinsi (m)	0		
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan provinsi (ha)	0		
		Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan provinsi (m)	0		
		Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan provinsi			
		Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan provinsi			
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah provinsi			
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0		
		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0		
		Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	0		
	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	Pemenuhan dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) lintas kabupaten/kota	0		
		Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) provinsi	0		
		Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaran SPAM	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	terhadap kebutuhan pemenuhan	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM			
	kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.			
	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Jumlah SPALD Regional			
		Total kapasitas SPALD Regional			
		Total volume limbah yang masuk ke SPALD Regional			
		Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan limbah domestik			
		Jumlah BUMD/UPTD/Badan Usaha Provinsi Pengelola Limbah Domestik			
	(Rasio kemantapan jalan)	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	896,45		
		Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan provinsi			
		Panjang jalan yang dibangun	2		
		Panjang jembatan yg dibangun	70		
		Panjang jalan yang ditingkatkan	9,25		
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0		
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	5,1		
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	0		
		Panjang jalan yang dipelihara	21,46		
		Panjang jembatan yang dipelihara	1750		
	(Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi	299		
		Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi	1060		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli)	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	241		
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data termutakhir	1		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	1		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	1		
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	1		
		Tersedianya data dan profil Perangkat Daerah suburusan Jakon. provinsi	1		
		Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga	1		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	1		
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	1		
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan 1kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek	1		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	1		
	(Persentase warga negara korban	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya			
	bencana yang memperoleh	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			
	rumah layak huni)	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam			
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam			
		Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi			
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi			
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana			
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi			
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
	(Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani)	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh $\geq 10-15$ Ha			
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH			
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh			
	(Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15	Jumlah pemukiman yang terfasilitasi PSU			
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Ha yang ditangani)	Jumlah pengembang yang teregistrasi			
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan			
5	KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/Kota yang ditangani	16	Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	8724		
		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	21		
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	1		
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2		
		Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	11		
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Penyediaan/pemutakhiran dokumen kajian risiko bencana provinsi	1	BPBD Provinsi Kepulauan Riau	
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana penanggulangan bencana provinsi	1		
		Penyediaan/pemutakhiran dokumen rencana kontijensi provinsi	1		
	Persentase penanganan pra bencana	Pelaksanaan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana provinsi dan kabupaten/kota	1		
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pemenuhan SPM sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota	1		
	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Penyediaan dokumen kaji cepat bencana provinsi	1		
		Respon cepat penanganan darurat bencana provinsi			
		Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana provinsi			
		Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana provinsi			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
6	Sosial	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket pemekanan di dalam panti sesuai standar gizi	680	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	75		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses (Panti)	1		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (Peralatan Kesehatan yang disediakan. Di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan kartu identitas anak di dalam panti	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga	0		
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga			
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket pemekanan di dalam panti sesuai standar gizi	402		
		Jumlah anak terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah di akses (panti)	1		
		Jumlah alat bantu yang disediakan didalam panti	0		
		Jumlah perbekalan Kesehatan (obat-obatan) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah peralatan Kesehatan yang disediakan didalam panti	0		
		Jumlah tenaga kesehatan (dokter, psikiater,peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah pekerja social professional/tenaga kesejahteraan social yang disediakan panti	0		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah anak terlantar yang difasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Identitas Anak dan Akta Lahir di dalam panti	0		
		Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar	2		
		Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah anak terlantar didalam panti yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	0	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau	
	(Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti)	Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	300		
		Jumlah lanjut usia terlantar yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	9		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial yang dilaksanakan di dalam panti			
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah pekerja social professional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti			
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti			
		Jumlah lanjut usia terlantar yang difasilitasi Nomor Induk Kependudukan di dalam panti			
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapat akses ke layanan dan Kesehatan dasar			
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga			
		Jumlah lanjut usia terlantar di dalam panti pelayanan reunifikasi keluarga			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan layanan pemulasaran			
	(Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti)	Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket permakanan dalam panti sesuai dengan standar gizi	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang menerima paket sandang di dalam panti	0		
		Jumlah asrama yang tersedia dan mudah diakses	0		
		Jumlah alat bantu yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah perbekalan kesehatan yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga perawat yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan fisik, mental, spiritual dan social yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah tenaga Kesehatan (dokter, psikiater, peksos medis) yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial yang disediakan di dalam panti	0		
		Jumlah paket bimbingan aktivitas hidup sehari-hari yang dilaksanakan di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat bimbingan keterampilan dasar	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang difasilitasi pembuatan pembuatan Nomor Induk Kependudukan, KTP, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau KIA di dalam panti	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan layanan Pendidikan & Kesehatan dasar	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah gelandangan dan pengemis di dalam panti yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga	0		
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga	0		
	(Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan)	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	0		
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	0		
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0		
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0		
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0		
		Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	0		
7	TENAGA KERJA	Dokumen perencanaan tenaga kerja provinsi	5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	
	(Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja)	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	87879,5		
		Jumlah perusahaan yang menyusun Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
		Jumlah Kabupaten/Kota yang telah dibina dalam penyusunan RTK perusahaan	7		
	(Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi)	Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi KKNI/okupasi	6,89		
		Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	100		
		Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	1,14		
		Persentase penganggur yang dilatih	0,59		
		Persentase lulusan bersertifikat kompetensi	100		
		Persentase penyerapan lulusan	64,96		



No	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Persentase LPK yang terakreditasi	35,42		
		Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan			
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			
	(Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja)	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	16,62		
		Persentase lembaga pemerintah, swasta dan pendidikan yang menjadi jejaring peningkatan produktivitas	93,75		
		Data tingkat produktivitas			
	(Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	16,62		
		Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	14,86		
		Rekapitulasi tahunan jumlah anggota Serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan pada tahun n	44691		
	(PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	100	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	99,95		
		Persentase perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit	16,45		
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	2,87		
		Jumlah mogok kerja	10		
		Jumlah penutupan perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan kepentingan	9		
		Jumlah perselisihan hak	44		
		Jumlah perselisihan antar SP/SB di perusahaan	0		
		Jumlah perselisihan PHK	185		
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	1751		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit	220	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan	8		
		Upah Minimum yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan	3.005.460		
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Internasional	58,62		
	(Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Jumlah rekomendasi persetujuan penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) yang diberikan oleh dinas provinsi	3		
	(dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar	Jumlah surat persetujuan penempatan antar kerja lokal (SPP AKL) kabupaten/kota dalam satu wilayah provinsi yang diterbitkan oleh dinas provinsi	2		
	kerja lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan langsung oleh swasta dalam satu wilayah provinsi	2479		
	dalam 1 (satu) daerah provinsi)	Jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia dalam satu wilayah provinsi	2202		
		Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu provinsi			
		Jumlah pejabat fungsional pengantar kerja			
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi	4		
		Jumlah Lembaga Tenaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT) yang mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi	7		
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) online/ Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER)	22		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi kepulangannya	0		
		Jumlah ijin kantor cabang perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)/ Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diterbitkan	0		
		Jumlah pos pelayanan keberangkatan dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	0		
	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kebebasan berserikat	1409		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma waktu kerja dan waktu istirahat	8564		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma pengupahan	8473		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma jaminan sosial	8542		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma kerja perempuan	8564		
		Jumlah perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan Kesehatan kerja	3083		
		Jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan	1		
		Jumlah perusahaan yang mendaftar Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) online	8564		
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah provinsi yang telah dilatih PUG		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat provinsi	94	ngan Anak, dan KB	
	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemprov (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki SPM	2		
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani			
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	6		
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	3		
	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 100.000	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	2		
		Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	2		
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapat pelatihan	16		
		Jumlah lembaga layanan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Provinsi (APBD provinsi)	6		
9	PANGAN	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	1	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian	
		Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	1		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase Cadangan Pangan	Tersedianya cadangan beras pemerintah provinsi	167,2	n, dan Kesehatan Hewan	
		Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	0		
		Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	1		
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi	7		
		Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi provinsi	1		
		Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	1782		
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rawan bencana pangan	3897		
		Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	1		
10	PERTANAHAN	Persentase Surat keputusan penetapan tanah lokasi	0	Dinas PU dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya	Jumlah masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan yang terselesaikan	0		
		SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh gubernur	0		
	diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Dokumen Peletakan lokasi rencana penggunaan tanah yang telah jelas tahapan kegiatan dan penganggarannya	0		
11	LINGKUNGAN HIDUP	Hasil Perhitungan Provinsi terhadap :		Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	a) Indeks Kualitas Air,(IKA)	73,19		
		b) Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,91		
		c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	60,39		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Data izin lingkungan PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi.	56.52	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau	
		Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi	23.08		
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 provinsi	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	0		
		Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan dan atau izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan usaha dan atau kegiatan yang lokasi dan berdampak lintas kabupaten/kota	4		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Fasilitasi pelayanan Adminduk	42,86	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau	
		Fasilitasi pelayanan Adminduk			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	100		
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya			
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan			
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan			
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	0	Dinas Peberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan KB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	23,1		
	(TFR)	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	11,4		
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	73,81		
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	7		
	Persentase pemakaian kontrasepsi	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	63,65		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25,34		
		Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	1		
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	100		
	(Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	28,57		
		Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	14,35		
15	PERHUBUNGAN	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe B		Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau	
	Rasio konektivitas provinsi	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah provinsi kelas ekonomi			
	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi			
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	95,12	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	85,37		
	yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Diskominfo	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	5		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	87,96		
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	68,28		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	100	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	100		
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100		
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	0		
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	0		
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	85,37		
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	75,61		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	0		
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	1,15		
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	0		
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	33,33		
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	100		
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	42,86		
	Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100		
	Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	50		
17	KOPERASI dan UKM	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	8,13	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau	
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	2,77		
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	5,32		
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	11,03		
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,48		
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,05	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	12,2		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,08		



No	Ururan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	0,05		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	43,97		
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	1,03		
	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala kecil	20,26		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	4,6		
		Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	0,84		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	22,11		
		Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0,31		
		Rasio usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0,28		
		Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0,14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	
18	PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	0		
	Persentase peningkatan	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	investasi di provinsi	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0		
		Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0		
		Kegiatan pameran penanaman modal	1		
		Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1		
		Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	0		
		Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	30		
		Laporan realisasi penanaman modal	1657		
		Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota			
		Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN			
		Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
19	PEMUDA DAN OLAHRAGA	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau	
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan			
	Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kepulauan Riau	
	Partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang mendapat Pelatihan manajemen organisasi kepemudaan			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan			
		Jumlah atlit yang dibina pada SKO, PPLP dan PPLM			
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah			
		Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan			
		Jumlah organisasi kepramukaan (kwarda) yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi			
20	STATISTIK	Tersedianya buku profil daerah	1	Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase Organisasi	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	3		
	Perangkat Daerah (OPD)	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	285		
	yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	3		
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	36		
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	63,41		
		Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100		
21	PERSANDIAN	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	66,67	Badan Kesbang pol Provinsi Kepulauan Riau	
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	95,12		
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	17,07		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerin (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	100		
22	KEBUDAYAAN	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	27	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	
	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	2		
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	25		
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	34		
		Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	23		
		Perlindungan cagar budaya provinsi (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	9		
		Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0		
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi);	0		
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	46		
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum			
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0		
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya			
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi			
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya			
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman			
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman			
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman			
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat			
23	PERPUSTAKAAN	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	45,61	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	9,72		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,01		
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	25,65		
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	1		
		Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	0		
		Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	783		
		Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	3		
		Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	53		
	Indeks Pembangunan	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
	Literasi Masyarakat	(digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya			
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	5		
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)			
24	KEARSIPAN	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	25	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Kepulauan Riau	
	Tingkat ketersediaan	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	33,33		
	arsip sebagai bahan	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	13,79		
	akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,86		
		Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0		
		Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	29		
		Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	0		
		Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	0		
		Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	0		
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah laut pedalaman territorial dan perairan kepulauan yang dikelola sumber daya ikannya	417012,69	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	
	Jumlah Total Produksi Perikanan	Jumlah izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan ukuran 5-30 GT	302		
		Persentase pelabuhan perikanan yang memiliki standar operasional	100		
		Jumlah izin pembangunan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5-30 GT	302		
		Jumlah kapal yang terdaftar	5922		
		Jumlah izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi yang diterbitkan	14	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase luas wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	24,44		
	Ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil yang dikelola	100		
		Jumlah unit kapal perikanan (10-30GT) yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	302		
		Jumlah pembudidayaan ikan yang mempunyai izin usaha perikanan (IUP) provinsi dan kab/kota yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan peraturan perundangan	87,96		
		Jumlah unit usaha dan pengolahan hasil perikanan provinsi yang mempunyai izin usaha perikanan provinsi yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap peraturan perundangan yang berlaku.	87		
		Jumlah pemegang izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil laut (diluar minyak dan gas bumi) yang diperiksa kepatuhannya (compliance) terhadap	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			
		Jumlah POKMASWAS yang aktif dalam mendukung pengawasan SDKP	47		
		Jumlah izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah provinsi yang diterbitkan	87		
26	PARIWISATA	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	516	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	499		
		Jumlah nilai realisasi investasi di bidang pariwisata di tingkat provinsi	1719784280000		
		Jumlah investasi per sektor usaha di bidang pariwisata	195		
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di provinsi	358	Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	
		Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara	3,03		
		Rata-rata tinggal wisatawan nusantara tingkat hunian akomodasi	1,74		
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	3103		
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara	719206		
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	25		
		Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi	0		
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	0		
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	1,456		
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	61,7		
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	58		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
27	PERTANIAN	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	7	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah penerbitan sertifikasi dan pengawasan benih tanaman hortikultura	18		
		Dokumen pengawasan benih yang beredar	1		
		Prasarana pertanian yang digunakan	100		
		Pengendalian penganggulan serangan organisme pengganggu pertanian	100		
		Luas areal pengendalian dan penganggulan bencana	0		
		Penerbitan izin usaha pertanian	12		
		Persentase sarana pertanian yang digunakan	100		
		Persentase fasilitasi penganggulan bencana	0		
		Persentase jumlah usulan usaha pertanian	100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	
28	KEHUTANAN	Dokumen penataan hutan wilayah KPH	66,67		
	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Dokumen rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek	50		
		Luas lahan kritis yang direhabilitasi	145		
		Luas kebakaran hutan di hutan lindung dan hutan produksi	0		
		Penurunan luas gangguan kawasan hutan melalui operasi pengamanan hutan (<i>illegal logging</i> dan perambahan)	0		
		Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000 m3 per tahun yang aktif	52		
		Tersedianya dokumen rencana pengelolaan hutan	0		
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	29		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	0		
		Menurunnya gangguan kawasan Tahura	0		
		Jumlah ketersediaan penyuluh kehutanan	0		
		Jumlah sarana dan prasarana kegiatan penyuluhan	0		
		Jumlah KTH yang diberikan pendidikan dan pelatihan	6		
		Fasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas usaha pada kelompok perhutanan sosial	69		
		Terusunnya rencana pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	3		
		Terbentuknya forum komunikasi DAS yang mendukung keterpaduan lintas sektor	1		
29	ESDM	Perda/Pergub terkait zonasi kawasan konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Peta konservasi air tanah dalam daerah provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait izin penggalian, pemakaian dan izin pengusahaan air tanah dalam area provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait penetapan nilai perolehan air tanah	0		
		Perda/Pergub terkait dengan tata ruang wilayah RZWP3K dalam daerah provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait dengan perizinan mineral bukan logam dan batuan dalam daerah provinsi	0		
		Perda/Pergub terkait IUJP	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Perda/Pergub terkait penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai UU 28/2009	0		
		Izin pemanfaatan langsung yang diterbitkan	0		
		Jumlah penerbitan SKT panas bumi dalam 1 tahun	0		
		SK izin usaha niaga bahan bakar nabati	0		
		Perda/Pergub terkait usaha penyediaan tenaga listrik dalam daerah provinsi (tata cara penerbitan, pembinaan dan pengawasan)	1		
		Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi	1		
		Perda/Pergub terkait penetapan tarif tenaga listrik pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
		Surat Persetujuan Gubernur terkait harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, —penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi	0		
		Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri kecuali untuk jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang tenaga listrik tegangan rendah			
		Pelaksanaan pembangunan listrik perdesaan dan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu	848		
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	32,88	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh pelatihan/ fasilitas peningkatan kapasitas terkait ekspor	100	Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir baru			
	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Jumlah penanganan pengaduan konsumen	78		
	Persentase pengaduan konsumen	Jumlah konsumen dan pelaku usaha yang teredukasi	10		
	Persentase komoditi potensial yang dipantau	Jumlah komoditi potensial yang dipantau	0		
	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Indeks Kinerja BPSMB	0		
	Tertib Usaha	Persentase SIUP Minuman Beralkohol (MB) bebas bea yang diterbitkan	0		
		Persentase rekomendasi SIUP MB bagi Distributor yang diterbitkan	100		
		Persentase SIUP Bahan Berbahaya bagi pengecer yang diterbitkan	0		
		Persentase penerbitan SIUP MB Gol B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat			
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0		
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Pengawasan pupuk dan pestisida terhadap pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida per tahun di provinsi	0		
		Jumlah barang beredar yang diawasi	74	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kepulauan Riau	
	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Beroperasinya pusat distribusi yang melayani wilayah provinsi	0		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,04		
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu			



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
31	PERINDUSTRIAN	Persentase terselesaikannya dokumen RPIP sampai dengan ditetapkan menjadi perda	0		
		Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) besar yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah izin perluasan industri (IUI) bagi industri besar yang diterbitkan	0		
		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 provinsi	0		
		Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kabupaten/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri lintas kab/kota			
32	TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kepri	
		Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			
		Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya			



2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah	89,689	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kepri	
		Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	82,694		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,9152	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Provinsi yang terakreditasi	48,571		
		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100,00		
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada situasi KLB Provinsi	100,00		
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	0	Dinas PU dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau	
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan provinsi	0		
		Persentase luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	0		
		Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota	53,207		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
		Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	0	Dinas Perkim	
		Rasio kemantapan jalan	79,083		
		Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	497,436		
4	Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0		
		Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	0		
		Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	0		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	4.762		
		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100		
		Persentase penanganan pra bencana	100		
		Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100		
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Dinas Sosial Provinsi	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
		Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	Kepulauan Riau	
		Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100		
		Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	0		
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100		
7	Tenaga Kerja	Persentase Kabupaten/Kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	57,143	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,505		
		Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	16,641		
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	16,453		
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	79,277		
		Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	84,738		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	8.827	Dinas PP, Perlindungan Anak dan KB	
		Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	3.3724		
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	21.5264		
9	Pangan	Persentase cadangan pangan	0.01		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas PU dan Pertanahan	
		Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	100	Provinsi Kepulauan Riau	
		Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas Kabupaten/Kota.	0		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	73.19	Dinas Lingkungan Hidup	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemda	6.667		
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala provinsi dalam satu tahun	100	Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Pemdes	
		Pemanfaatan data kependudukan	43,902		
13	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	32,143		
		Persentase peningkatan status desa mandiri	1,136		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.53	Dinas PP, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	42.261		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	26.267		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas provinsi	0.68	Dishub	
		Kinerja lalu lintas provinsi	0.43		
16	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85.366	Dinas Komunikasi dan	



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	Informasi Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	11.854		
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	53.731	Diskop UKM	
		Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	42.375		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-34.193	Dinas PM dan PTSP	
19	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0.638	Dispora	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0.017		
		Peningkatan prestasi olahraga	0		
20	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	Barenlitbang Prov. Kepri	
		Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	69.011	Dinas Kesbang	
22	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	0	Disbud	
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	61.83	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Kepri	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	21.33		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl 40 dan 59 U 43/2009)	18.25		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	4.83		
25	Kelautan dan Perikanan	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	324.447	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kepri	
		Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	90		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-99.239	Dinas Pariwisata Prov. Kepri	
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-89.946		
		Tingkat hunian akomodasi	23.022		
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.151		
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	19.724	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepri	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-20		
28	Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	100	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Prov. Kepri	
		Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0		
		Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	1.762		
29	Energi Sumber Daya Dan Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	0	Distamben Prov. Kepri	
		Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	98,798		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
30	Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	26,919	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase penanganan pengaduan konsumen	88,462		
		Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	0		
		Tertib Usaha	100		
		Persentase kinerja realisasi pupuk	0,015		
		Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	91,241		
		Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	0,08		
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	4,735		
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0		



No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja (%)	Sumber Data	Ket.
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0		
32	Transmigrasi	Tidak Perlu diisi			

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan dan Keuangan	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan		Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau	
		Persentase PAD			
		Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)			
		Opini Laporan Keuangan	4		
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3		
		Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2		
34	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Biro Administrasi Pelayanan Pengadaan	
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	10,775		
		Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	49,674		
35	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50.06	BKPSDM	
		Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	12.68		
		Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100		



No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket.
36	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD		BPKAD Prov. Kepri	
		Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD			
		Assets management	3		
		Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya			
37	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)		Diskominfo Prov. Kepri	
		Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)			



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja merupakan pembangunan yang diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik, bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan dan RB No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

a. Target Kinerja dan Pengukuran Capaian Kinerja dalam Perjanjian Kerja

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran yang berdasarkan dokumen penetapan kinerja Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 yang ditargetkan untuk dicapai.



Tabel 2.1
TARGET DAN CAPAIAN KINERJA
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	70,75	28,89	40,83
2	Meningkatnya Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase Jalan Provinsi Berkondisi Baik	75,00	76,38	101,85
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase Ketersediaan Pelabuhan Laut	100	100	100
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentase Pelayanan Akses Air Bersih yang Aman	100	92,77	92,77
5	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi	94,50%	94,50%	100,00
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	10,41	10,18	97,79
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,6	9,91	49,85
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (<i>Underweight</i>) Pada Anak Balita	16,2	13,4	117
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,68%	5,75%	98,77%
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62,02	95,42
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	306.463,67	256.030,43	83,54



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.500.000	3.103	0,12
13	Meningkatnya Realisasi Investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA)	8.100	13.963	172
		Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	900	6.562	728
14	Meningkatnya Kinerja Sektor Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,52	8,15	98,79
15	Berkurangnya Kerusakan Lingkungan, Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau Publik di Wilayah Perkotaan	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,99 %	16,27%	148,04%
16	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Pegawai	80	53.6	67.00
		Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	100
		Nilai E- Government	2,6	1,96	78,4

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibanding dengan Tahun Sebelumnya

Berikut adalah perbandingan “Nilai e - government Provinsi Kepri dari tahun 2018- 2021 berdasarkan instrumen penilaian:

Tabel 2.2
Nilai e-government Provinsi Kepri
Tahun 2018- 2021

No	Instrumen Penilaian	Nilai e-government			
		2018	2019	2020	2021
1.	Nilai PEGI	2,1	2,4		NA



2.	Indeks SPBE	2,17	2,73	2,80	1,96
----	-------------	------	------	------	------

Dari tabel dapat diperlihatkan bahwa: bahwa hasil penilaian e-government Provinsi Kepri berdasarkan instrumen pegi dan indeks SPBE hampir sama.

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target RPJMD

Berikut Perbandingan realisasi kinerja nilai e-government Provinsi Kepri 2021 terhadap target akhir RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.3
Perbandingan Nilai e-government Provinsi Kepri Tahun 2021
terhadap Target RPJMD

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Nilai e-government provinsi kepri	2.5	1,96	78,4%

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa Capaian kinerja nilai e-government Provinsi Kepri realisasi dibandingkan dengan target RPJMD adalah 78,4%. Pencapaian kinerja Pemerintah Provinsi Kepri sudah diatas target RPJMD.

d. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Kinerja yang Dicapai

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi.

Pencapaian kinerja dan anggaran pada tahun 2021 secara umum menunjukkan tingkat efisiensi anggaran yang **sangat tinggi**. Hal ini bisa dilihat bahwa dari 16 sasaran mayoritas dari seluruh sasaran menunjukkan realisasi anggarannya lebih kecil daripada realisasi kinerjanya. Ini bisa bermakna bahwa secara umum, pencapaian kinerja dari aspek program telah dicapai dengan cara



yang efisien karena realiasi anggarannya lebih kecil daripada yang ditargetkan dan juga lebih kecil daripada realisasi capaian kinerjanya.



Tabel 2.4

Capaian Target Kinerja dan Efisiensi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA (%)			ANGGARAN			KET
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	EFISIENS I	
1	Meningkatnya Kelestarian Nilai-Nilai Budaya Melayu Sebagai Kekayaan Budaya Daerah	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu (%)	70,75	28,89	40,83	6.440.516.632,-	5.098.074.336	79.16 %	Efisien
2	Meningkatkan Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Baik	Persentase jalan provinsi berkondisi baik (%)	75,00	76,38	101,85	80.132.351.143,-	76.190.194.669	95	Efisien
3	Meningkatnya Ketersediaan Prasarana dan Sarana Transportasi	Persentase ketersediaan Pelabuhan Laut (%)	100	100	100	11.091.115.790,-	6.753.721.287,22	60,89	Kurang Efisien
4	Meningkatnya Akses Pelayanan Air Bersih	Persentasi pelayanan akses air bersih yang aman (%)	100	92,77	92,77	2.706.500.000,-	1.313.250.524	48,52	Kurang Efisien
5	Meningkatnya rasio elektrifikasi	Rasio Elektrifikasi (%)	94,50 %	94,50%	100	5.420.447.668,-	5.111.2888.997,98,-	94,30	Efisien
6	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata – Rata Lama Sekolah	10,41	10,18	97,79	401.994.678.112,-	368.923.973.576,-	91.77	Efisien
7	Meningkatnya Kualitas dan Profesionalisme Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6.6	9,91	49.85	6.781.228.850,-	6.463.661.917,-	95,317	Efisien
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Persentase Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita	16,2	13,4	117	1.560.455.400,-	1.193.504.235,-	85,3	Efisien
9	Angka Kemiskinan Menurun	Persentase Penduduk Miskin	5,68%	5,75%	98,77%	4.202.397.487,-	4.027.128.424,-	95,82	Efisien
10	Meningkatnya Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	65	62,02	95,42	4.044.538.134,-	3.652.998.626,-	90.319302	Efisien
11	Meningkatnya Produksi Perikanan dan Olahan Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	306.463,67	256.030,43	83,54	24.700.830.940,-	23.288.317.831,59	95,29	Efisien
12	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (juta)	2.500.000	3.103	0,12	17.834.774.300,-	16.514.121.535,-	92,60	Efisien
13	Meningkatnya realisasi investasi dan daya saing Koperasi dan UKM	Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) (Rp Milyar)	8.100	13.963	172	8.100.000.000.000,	13.963.745.140.000,-	172	Efisien



				Jumlah Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) (Rp Milyar)	900	6.562	728	900.000.000.000,-	6.562.498.700.000,-	728	Efisien
14	Meningkatnya Perdagangan	Kinerja Sektor	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	8,52	8,15	98,79	3.147.954.631,-	2.971.471.271,-	98,39	Efisien	
15	Berkurangnya Lingkungan, Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau di Perkotaan	Kerusakan Meningkatnya Luas Wilayah	Proporsi RTH Publik di Kawasan Perkotaan	10,99 %	16,27%	148.04%	170.000.000,-	169.973.000,-	99,88	Efisien	
16	Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Daerah	Pelayanan Pemerintah	Indeks Profesionalitas Pegawai	80	53.6	68.94	7.661.639.050,-	5.353.47.920,-	69,87	Efisien	
			Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	BB	BB	100	738.832.275,-	716.124.895,-	98	Efisien	
			Nilai e-Government	2,5	1,96	116,67	7.609.092.355,-	7.551.562.355,-	98,24	Efisien	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Tugas Pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.

Tugas pembantuan pada pemerintah provinsi mencakup tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten/kota. Pada tahun 2021 Provinsi Kepulauan Riau hanya melaksanakan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat, dan tidak memberikan tugas pembantuan kepada kabupaten/kota. Dua urusan pemerintahan yang memperoleh Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat yaitu; (1) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan (2) urusan pertanian.

3.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerah

Terdapat 2 (dua) kementerian yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang pertama yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dana Tugas Pembantuan yang diterima sebesar Rp 19.167.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp 19.166.997.000,- (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program yang dilaksanakan yaitu: Program Penyelenggaraan Jalan berdasarkan DIPA-033.04.4.329039/2021.

Kedua, Kementerian Pertanian RI yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.642.858.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.125.996.070,00 (93,24%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Adapun Program dan Kegiatan yang ditugaskan Kementerian Pertanian RI adalah sebagai berikut:



- a. DIPA Nomor: SP DIPA-018.04.4.320088/2021 yang merupakan Tugas Perbantuan (TP) dari Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan 3 (tiga) program, yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Pengelolaan dan Pemasaran Hortikultura.
 - (2) Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
 - (3) Program Dukungan Manajemen. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Peningkatan Manajemen dan Teknis Lainnya ditjen Hortikultura.
- b. DIPA Nomor : SP DIPA-018.05.4329079/2021 Tanggal yang merupakan TP dari Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan 2 (dua) program, yaitu :.
 - (1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Pada Program ini terdapat 2 (dua) kegiatan yaitu:
 - Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - (2) Program Dukungan Manajemen. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.
- c. DIPA Nomor : SP DIPA-018.06.4.329080/2021 yang merupakan TP dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan 3 (tiga) program, yaitu :
 - (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak.
 - (2) Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada Program ini terdapat 4 (empat) kegiatan yaitu:
 - Peningkatan Produksi Pakan Ternak.



- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
 - Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
 - Peningkatan Kesehatan Masyarakat Vetiner
- (3) Program Dukungan Manajemen. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
- Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Peternakan.
- d. DIPA Nomor : SP DIPA-018.08.4.329082/2021 yang merupakan TP dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan 3 (tiga) program, yaitu :
- (1) Program Ketersediaan akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
- Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.
- (2) Program Dukungan Manajemen. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
- Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- e. DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.329077/2021 yang merupakan TP dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan 3 (tiga) program, yaitu :
- (1) Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
- Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.
- (2) Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Pada Program ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yaitu:
- Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan.
 - Pengelolaan produksi tanaman serelia tanaman pangan.
 - Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan
- (3) Program Dukungan Manajemen. Pada Program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu:
- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan.



3.3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan dana Tugas Pembantuan yang diterima tahun 2021 sebesar Rp 19.167.000.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp 19.166.997.000,00 (100%) dan realisasi fisik sebesar 100%. Program yang dilaksanakan yaitu: Program Penyelenggaraan Jalan berdasarkan DIPA-033.04.4.329039/2021.

Kementerian Pertanian RI memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dengan Dana Tugas Pembantuan tahun 2021 sebesar Rp. 7.642.858.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.125.996.070,00 (93,24%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

Tugas Pembantuan dari Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Kab/Kota untuk tahun anggaran 2021 tidak ada.

3.3.1 Target Kinerja

Target kinerja yang ditetapkan atas pelaksanaan penugasan program/kegiatan adalah 100% secara fisik adapun terkait realisasi keuangan menyesuaikan dengan harga yang berlaku di lapangan.

3.3.2 Realisasi

Adapun realisasi dari target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Tugas Pembantuan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
1	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	DIPA- SP DIPA- 033.04.4.3290 39/2021	Program Penyelenggaraan Jalan Kegiatan Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan Output 20,25 km	Kepri	Dinas PU	4.218.087.000	4.218.087.000	100	20,25 km	100	
			Kegiatan Padat Karya Preservasi Jalan Output 135,57 km	Kepri	Dinas PU	4.723.573.000	4.723.573.000	100	135,57 km	100	
			Kegiatan Tambahan Padat Karya Revitalisasi Drainase Preservasi Jalan Output 1,141 km	Kepri	Dinas PU	2.657.496.000	2.657.496.000	100	1,141 km	100	
			Kegiatan Tambahan Padat Karya Penanganan Perbaikan Lereng Preservasi Jalan Output 1,25 km	Kepri	Dinas PU	2.293.096.000	2.293.096.000	100	1,25 km	100	
			Kegiatan Penanganan Drainase Padat Karya Preservasi Jalan Output 16,98 km	Kepri	Dinas PU	4.431.213.000	4.431.213.000	100	16,98 km	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
			Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Bina Marga Output 3 layanan	Kepri	Dinas PU	752.868.000	750.022.000	99	3 layanan	100	
	Jumlah					19.167.000.000	19.166.997.000	99,99		100	
2	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.04.4.3200 88/2021	Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri Kegiatan Pengelolaan dan Pemasaran Hortikultura Output : 4 Unit	Kepri	Dinas KP2KH	122.000.000	117.070.200	95,96	4 Unit	100	
			Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Output : 110 Ha	Kepri	Dinas KP2KH	1.155.000.000	1.132.513.592	98,05	110 Ha	100	
			Program Dukungan Manajemen Kegiatan Peningkatan Manajemen dan Teknis Lainnya ditjen Hortikultura Output : 2 Layanan	Kepri	Dinas KP2KH	80.000.000	77.449.000	96,81	2 Layanan	100	
			Jumlah			1.357.000.000	1.001.111.228	95,02		100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
3	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.05.432907 9/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Pasca Panen Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan Output : 2 Unit	Kepri	Dinas KP2KH	633.460.000	602.444.028	95,10	2 Unit	100	
			Kegiatan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Output : 19 Ha	Kepri	Dinas KP2KH	335.240.000	314.251.300	93,74	19 Ha	100	
			Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Output : 1 Layanan	Kepri	Dinas KP2KH	84.890.000	84.415.900	99,44	1 Layanan	100	
			Jumlah			1.053.590.000	1.001.111.228	95,02		100	
4	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.06.4.3290 80/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Pengembangan dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Output : 1 Lembaga	Kepri	Dinas KP2KH	42.000.000	41.988.600	99,97	1 Lembaga	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
			Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak Output : 10 Produk	Kepri	Dinas KP2KH	18.470.000	18.460.000	99,95	10 Produk	100	
			Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Output : 2 Layanan	Kepri	Dinas KP2KH	52.000.000	51.914.800	99,84	2 Layanan	100	
			Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak Output : 942 Kelompok	Kepri	Dinas KP2KH	530.224.000	528.686.600	99,71	942 Kelompok	100	
			Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner Output : 5 Lembaga, 3 Orang, 50 Produk	Kepri	Dinas KP2KH	289.250.000	261.484.600	90,40	5 Lembaga, 3 Orang, 50 Produk	100	
			Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Peternakan Output : 4 Layanan	Kepri	Dinas KP2KH	184.428.000	184.387.000	99,98	4 Layanan	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
			Jumlah			1.116.372.000	1.086.921.600	97,36		100	
5	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.08.4.3290 82/2021	Program Ketersediaan akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Output :1.641 Orang	Kepri	Dinas KP2KH	317.800.000	278.818.500	87,73	1.641 Orang	100	
			Program Dukungan dan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Lainnya Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Output : 1 Layanan	Kepri	Dinas KP2KH	572.290.000	482.527.000	84,32	1 Layanan	100	
			Jumlah			890.090.000	761.345.500	85,54		100	
6	Kementerian Pertanian	SP DIPA-018.03.4.3290 77/2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Kegiatan Pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman Pangan Output : 10 Unit	Kepri	Dinas KP2KH	481.600.000	409.718.400	85,07	10 Unit	100	

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)	Ket
			Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan Output : 300 Ha	Kepri	Dinas KP2KH	820.000.000	813.502.800	99,21	300 Ha	100	
			Kegiatan Pengelolaan produksi tanaman serelia tanaman pangan Output : 1 Kegiatan	Kepri	Dinas KP2KH	75.000.000	58.676.950	78,24	1 Kegiatan	100	
			Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Tanaman Pangan Output : 55 Ha	Kepri	Dinas KP2KH	1.242.125.000	1.155.040.400	92,99	55 Ha	100	
			Program Dukungan Manajemen Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Tanaman Pangan Output : 2 layanan	Kepri	Dinas KP2KH	607.081.000	512.646.400	84,44	2 Layanan	100	
			JUMLAH			3.225.806.000	2.949.584.950	91,44		100	
	TOTAL					7.642.858.000	7.125.996.070	93,24		100	



3.3 Permasalahan dan Kendala

Kegiatan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Riau dan kegiatan urusan pertanian pada tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau berjalan dengan baik, tidak ada permasalahan yang dihadapi.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib pemerintahan dengan memperhatikan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya melakukan percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dalam lingkungan masyarakat dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan yang salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan SPM. Ada 6 (enam) urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, adapun penjelasan lebih detil di bawah akan disampaikan berdasarkan jenis pelayanan, target dan realisasi SPM, alokasi anggaran, dukungan personil, dan permasalahan serta solusi.

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan di tingkat provinsi terdiri atas:

- a. Pendidikan menengah; dan
- b. Pendidikan khusus.

4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target capaian SPM pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 untuk jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK adalah 82.697 siswa, sedangkan jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah 1.485 siswa.

4.1.3 Realisasi

Tabel 4.1

Realisasi Capaian Target SPM Bidang Pendidikan Tahun 2021



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	%
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan MA/SMA/SMK	82.697	74.170	89,69
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB	1.485	1.228	82,69

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran pendukung pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Rp. 807.712.954.860, terdiri dari:

- a. APBD Provinsi Kepri Rp. 465.388.875.000
- b. BOS Rp. 241.782.714.860
- c. DAK Rp. 100.541.365.000

4.1.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM bidang pendidikan menengah dan khusus didukung oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari :

- a. Tenaga Pendidik pada Sekolah Menengah berjumlah 5.677 orang yang terdiri dari 2.172 orang PNS dan 3.505 orang Non PNS
- b. Tenaga Pendidik pada Sekolah Pendidikan Khusus sebanyak 255 orang, terdiri dari 54 orang PNS dan orang 201 orang Non PNS.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Belum terbentuknya Tim Penerepan SPM Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan dapat mempercepat penerapan SPM bidang pendidikan
2. Masih tingginya angka putus sekolah di Sekolah Menengah
3. Belum tersedianya data Anak Tidak Sekolah yang tervalidasi untuk penetapan sasaran penerima layanan SPM, Program/Kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan
4. Siklus penganggaran baru akan dimulai pada Tahun 2021-2024, sehingga penganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum



termuat dalam Dokumen Perencanaan baik RENSTRA maupun RKPD, walaupun sebenarnya sebagian besar kegiatan yang ada sudah berkesesuaian dengan Indikator SPM.

5. Belum adanya Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.
6. Sebagian kegiatan tidak dapat dijalankan karena adanya refocusing anggaran akibat pandemi yang masih berlangsung sejak tahun 2021.

b. Solusi

1. Harus ada kebijakan yang konsisten terkait pemerataan dan pengembangan Pendidikan
2. Menyegerakan pembentukan Tim Penerapan SPM untuk percepatan pelaksanaan tahapan penerapan SPM bidang pendidikan.
3. Mencecah siswa putus sekolah dengan pendekatan Home Visit dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.
4. Menyegerakan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud No. 32 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
5. Segera melakukan pengintegrasian penerapan Standar Minimal Pelayanan Pendidikan ke dalam Dokumen Perencanaan dan Melakukan koordinasi dengan pihak terkait.
6. Menyegerakan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan di tingkat Provinsi sebagai turunan dari Permendikbud Nomor. 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan
- b. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi.

4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target capaian SPM bidang kesehatan Provinsi Kepulauan Riau adalah 100% dari pencapaian. Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar (4.880 orang), sedangkan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) provinsi pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar (45.185 orang)

4.2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Provinsi Kepulauan Riau Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator pencapaian	Realisasi
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi.	Jumlah warga negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana Provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (4.880 orang)	100%
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi.	Jumlah warga negara pada kaondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan (45.185 orang)	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.

4.2.4 Alokasi Anggaran



Alokasi anggaran 2021 di Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| a. APBD Provinsi Kepri | Rp. 1.459.159.200,- |
| b. APBD – P | Rp. 8.099.050.647,- |
| c. APBN | Rp. - |

4.2.5 Dukungan Personil

Jumlah Tenaga Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebanyak 272 orang, dengan rincian sebagai berikut :

- Tim Relawan Vaksinasi Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 223 orang;
- Tim Vaksinasi Covid-19 Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 49 orang.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Terbatasnya penganggaran Pemerintah Daerah.
- 2) Data yang tersedia di tingkat Provinsi tidak bisa mengakomodir semua data yang ada di aplikasi SPM Kemendagri, ada beberapa permasalahan saat penginputan data SPM pada aplikasi yaitu terdapat pelaporan ganda untuk pelaporan SPM yaitu pelaporan melalui aplikasi SPM Kemendagri dan Pelaporan melalui aplikasi SPM Kemenkes RI. Untuk pelaporan SPM Kemendagri data SPM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Terdapat data output aplikasi SPM Kemendagri yang tidak tersedia di Provinsi.

b. Solusi



- 1) Memprioritaskan percepatan pencapaian target SPM dengan penetapan skala prioritas kegiatan.
 - 2) Pusat untuk dapat melakukan integrasi pelaporan SPM baik bersumber Kementerian Kesehatan RI atau Kementerian Dalam Negeri karena data yang dilaporkan secara umum sama, hanya berbeda format sehingga memudahkan daerah untuk melakukan pelaporan.
 - 3) Adanya pemutakhiran data oleh Kementerian Dalam Negeri terkait data SPM di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
 - 4) Penambahan kapasitas Tempat Tidur sebanyak 30%.
- c. Rencana Tindak Lanjut
- 1) Pemetaan Prioritas Kegiatan.
 - 2) Refocusing Program/Kegiatan.
 - 3) Pemetaan Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit.
 - 4) Pemetaan Kapasitas Tempat Tidur di Rumah Sakit.

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Minimal yang menjadi wewenang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang SPM mencakup:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota.



- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota.

1. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum pada tahun anggaran 2021 merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100% dan masih dilaksanakan oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau.

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri yang daerah pelayanannya mencakup kabupaten bintan dan kota tanjungpinang dan didukung dengan pembangunan infrastrukturnya oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam bentuk penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Kepri.

Dalam hal Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota yaitu Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, sampai saat ini belum teridentifikasi kebutuhan terkait pengelolaan air limbah domestik secara regional. Pengolahan air limbah domestik di kabupaten bintan dan kota tanjungpinang hingga saat ini dilakukan secara individu dan komunal setempat yang kemudian dikelola dan dilakukan pengawasannya oleh masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga belum teridentifikasi kebutuhan terhadap Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

Tabel 4.3.

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021



NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota. (249.899 jiwa)	100 %	1(satu) tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa	100%	1(satu) tahun

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

2. Realisasi.

Tabel 4.4.

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1.	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan Air Minum Curah Lintas Kab/Kota. (132.958 jiwa)	53,20 %
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Regional Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Yang Dilayani Oleh SPALD Regional Provinsi Dalam Satu Kelurahan/ Desa (0)	0%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota pada tahun anggaran 2021 sebesar 53,20% dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan = 249.899 jiwa

Jumlah penduduk terlayani = 132.958 jiwa

Capaian = $\frac{\text{Jumlah penduduk terlayani}}{\text{Jumlah penduduk di Wilayah Pelayanan}} \times 100\% = 53,20\%$

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota bersumber dari APBD Tahun 2021 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp.1.848.077.746,56 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 4.5.
Alokasi anggaran pendukung pelayanan dasar
Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota
bersumber dari APBD Tahun 2021

No	Pekerjaan	Nilai	Keterangan
1.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan Tersier di Jalan Ganet Kota Tanjungpinang	Rp.708.657.746,56	Sudah dilaksanakan 100%
2.	Studi Kelayakan Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan	Rp.519.420.000,00	Sudah dilaksanakan 100%
3.	Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu Kota Piring	Rp.200.000.000,00	Tidak dilaksanakan karena sudah dilakukan pemasangan di lokasi yang sama oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri pada tahun anggaran yang sama.
4.	Pengadaan Pompa PDAM Tanjungpinang	Rp.600.000.000,00	Sehubungan dengan pandemi covid-19, maka dilakukan refocusing terhadap kegiatan tersebut.

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

4. Dukungan Personil

Jumlah pegawai Bidang Cipta Karya pada Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Jumlah PNS sebanyak 12 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:
 - 1) S 2 : 1 orang
 - 2) S1 : 9 orang
 - 3) SLTA : 2 orang
- b. Jumlah PTT (Pegawai Tidak Tetap) sebanyak 3 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:
 - 1) S 1 : 3 orang



- c. Jumlah THL (Tenaga Harian Lepas) sebanyak 8 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut :

- 1) S1 : 3 orang
- 2) SLTA : 5 orang

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Ketersediaan anggaran pemenuhan kebutuhan air curah kabupaten/kota sangat terbatas pada Bidang Cipta Karya.
- 2) Terdapat beberapa usulan kegiatan prioritas (mendesak) namun belum dianggarkan yaitu:
 - Konsultasi Publik Rencana Induk SPAM Regional Pulau Bintan.
 - Penyusunan Dokumen Lingkungan Rencana Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.
 - Penggantian Pipa JDU PDAM Tirta Kepri di BT.10 - Simpang Perla.
- 3) Kurangnya SDM dengan latar belakang pendidikan S1 Teknik Lingkungan yang ditempatkan dibawah seksi Pembangunan dan Pengembangan SPAM dan Sanitasi pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

b. Solusi



- 1) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Balai Permukiman dan Prasarana Wilayah Kepri khususnya untuk Pembangunan SPAM Regional Pulau Bintan.
- 2) Penyusunan DED untuk pekerjaan Penggantian Pipa JDU PDAM Tirta Kepri di BT.10 - Simpang Perla akan diusulkan melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau.

4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018, tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Perumahan rakyat terdiri atas:

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana Provinsi.
- 2) Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.

1. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Perumahan Rakyat di Provinsi Kepulauan Riau merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%. Adapun target pada jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi



sebanyak 11 Rumah dan pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi sebanyak 0 Rumah.

Tabel 4.6
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2021

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni. (11 rumah)	100 %	1 (satu) tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0%	1 (satu) tahun

Sumber : Dinas Perumahan & Kawasan Pemukiman.

2. Realisasi

Realisasi target yang dicapai selama tahun anggaran 2021 pada jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi sebanyak 11 Rumah dan pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi sebanyak 0 Rumah, sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat diukur dengan indikator Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Adapun realisasi



target capaian SPM Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel 4.7
Realisasi Pencapaian SPM Perumahan Rakyat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni (11 rumah)	100%
2.	Fasilitasi Penye-Diaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi (0 rumah)	0%

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau.

3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Alokasi Anggaran Pendukung SPM Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	
			APBD	APBN
1.	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Provinsi	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi.	855.399.000	-
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau.

4. Dukungan Personil



Untuk mendukung pelaksanaan semua program dan kegiatan pelayanan dasar ini maka dukungan personil pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau adalah staf Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepri dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah staf PNS sebanyak 3 orang.
- b. Jumlah staf Non PNS 13 orang.

5. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- 1) Tidak adanya SK penetapan Bencana Provinsi
- 2) Tidak adanya Program Pemerintah yang mengharuskan dilakukannya Relokasi Masyarakat.

b. Solusi

- 1) Melakukan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana berdasarkan Proposal yang masuk dari masyarakat melalui mekanisme belanja Hibah.

4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yaitu:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Daerah Provinsi.



2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi Kepulauan Riau Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merujuk pada target dan indikator pada Permendagri No. 100 Tahun 2018 yaitu sebesar 100%.

Tabel 4.9
Target Pencapaian SPM Bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Provinsi	100%	1 (satu) tahun

Sumber : SatPol PP Provinsi Kepulauan Riau

3. Realisasi

Capaian kinerja indikator SPM bidang trantibum adalah 0, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	REALISASI
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi.	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0

Sumber : SatPol PP Provinsi Kepulauan Riau

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang ditetapkan dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal oleh Satpol PP dan Penanggulangan



Kebakaran pada tahun 2021 adalah 0, karena belum diakomodir di dalam DPA tahun 2021.

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Satuan Satpol PP dan Penaggulangan Kebakaran di Provinsi Kepri Tahun 2021 sebanyak 160 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. Berdasarkan Status Pegawai

1) Jumlah PNS sebanyak 41 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

- Sarjana (S1/D4) : 7 orang
- SLTA : 33 orang
- SMP : 1 orang

2) Jumlah PTT sebanyak 82 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

- Sarjana (S1/D4) : 22 orang
- SLTA : 60 orang

3) Jumlah THL sebanyak 37 orang dengan tingkat pendidikan formal sebagai berikut:

- Sarjana (S1/D4) : 1 orang
- SLTA : 29 orang
- SMP : 6 orang
- SD : 1 orang

6. Permasalahan dan solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal adalah :



- 1) Anggaran pendukung pencapaian SPM tahun 2021 belum teranggarkan dalam RKPD murni/RKPD Perubahan 2021 dan Renja murni dan Renja Perubahan Satpol 2021
- 2) Belum adanya kebijakan daerah terkait standar teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

b. Solusi

Solusi yang dilakukan oleh Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan SPM adalah :

- 1) Melakukan pengintegrasian penerapan SPM pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja).
- 2) Menyusun peraturan gubernur terkait standard teknis pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

4.6 Bidang Urusan Sosial

Dasar Hukum SPM Bidang Urusan Sosial adalah Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

1. Jenis Pelayanan Dasar

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti



- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Target Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (755 orang)	100 %	1 (satu) tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (402 orang)	100 %	1 (satu) tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (300 orang)	100 %	1 (satu) tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan	Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi	100 %	1 (satu) tahun



	Pengemis) di dalam Panti	kebutuhan dasarnya di dalam panti. (13 orang)		
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Persentase korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. (1.541 orang)	100 %	1 (satu) tahun

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial

Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

Tabel 4.12
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Tahun 2021.

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti	Persentase penyandang disabilitas telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (755 orang)	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di dalam Panti	Persentase anak telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (402 orang)	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlanter di dalam Panti	Persentase lanjut usia telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (300 orang)	100 %



4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial (khususnya Gelandangan dan Pengemis) di dalam Panti	Persentase tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti. (9 orang)	69,23 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial	Persentase korban bencana alam dan korban bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. (1.541 orang)	100 %

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2021 di Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial berjumlah Rp 3.141.335.131,00 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) APBD : Rp 2.240.229.131,00
- 2) APBN : Rp. 901.106.000,00

5. Dukungan Personil

Jumlah pegawai pelaksana Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 sebanyak 16 orang dengan perincian :

- 1) PNS/ CPNS : 12 Orang
- 2) PTT PROVINSI : 4 Orang

Jumlah tenaga PNS/ CPNS sebanyak 12 orang, berdasarkan pendidikan formal dengan perincian sebagai berikut :

- 1) S 2 : 1 Orang



2) 2 1 : 10 Orang

3) SLTA : 1 Orang

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyelenggarakan SPM:

- 1) Minimnya anggaran
- 2) Keterbatasan personil
- 3) Tidak ada panti milik pemerintah
- 4) Ketidaktercapaian target pada layanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial tersebut disebabkan adanya refocusing anggaran dalam masa pandemi *Covid-19*. Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar honorarium Satgas WNIM-KPO.

b. Solusi

- 1) Mengajukan penambahan personil
- 2) Memfasilitasi panti swasta dengan anggaran yang terbatas, yang tentunya tidak sepenuhnya memenuhi kriteria ideal.
- 3) Dinas Sosial bekerja sama dengan Badan Amil Zakat (Baznas) agar biaya pemulangan tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis) ditanggung oleh Baznas. Pada tahun 2021, dari 13 orang yang seharusnya dipulangkan ke daerah asal, hanya 9 orang yang berhasil dipulangkan dengan biaya dari Baznas. Adapun 4 orang lainnya tidak dipulangkan karena yang bersangkutan kabur sebelum waktu pemulangan.



4.7 Program dan Kegiatan

A. Bidang Pendidikan

1. Program dan kegiatan pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Menengah dalam meningkatkan Persentase Penduduk Usia 16-18 tahun yang mendapatkan layanan SMA/SMK adalah sebagai berikut:

Tabel 4.13
Program/ Kegiatan yang bersumber dari dana APBD

PROGRAM	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN		PAGU	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		10.628.421.450	2.001.050.502
	1	Penambahan Ruang Kelas Baru	6.186.253.000	10.908.000
	2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	1.033.547.000	1.024.063.602
	3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	1.312.690.000	387.360.000
	4	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	482.932.250	360.796.400
	5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.612.999.200	217.922.500
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		39.822.884.340	34.939.610.988
	1	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	200.000.000	194.564.800
	2	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	200.000.000	172.323.525
	3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	432.278.950	362.253.375
	4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.380.000.000	551.665.300
	5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	37.610.605.390	33.658.803.988

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.13
Program/ Kegiatan yang bersumber dari dana DAK



PROGRAM	KEGIATAN / SUB. KEGIATAN		PAGU	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		71.239.841.500	35.458.073.032
	1	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	4.069.666.000	2.121.121.770
	2	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika	2.763.711.000	2.219.524.024
	3	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	2.182.988.000	1.637.687.174
	4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.521.061.500	5.527.419.948
	5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	17.005.612.000	9.817.299.566
	6	Pengadaan Mebel Sekolah	1.773.990.500	5.548.023.650
	7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	32.922.812.500	8.586.996.900
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		68.709.855.000	35.994.588.988
	1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.840.000.000	10.607.650
	2	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	16.302.000.000	12.993.773.491
	3	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	1.762.400.000	1.430.189.081
	4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.858.319.000	910.380.355
	5	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	2.945.800.000	0
	6	Pengadaan Mebel Sekolah	1.234.200.000	1.109.009.000
	9	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	19.926.540.000	19.540.629.411
	10	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	19.840.596.000	0

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.14

Program/ Kegiatan yang bersumber dari dana BOS

PROGRA M	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
-------------	----------	------	-----------



Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		99.183.148.376	98.929.991.000
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	99.183.148.376	98.929.991.000
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan		72.178.471.059	72.042.952.034
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	72.178.471.059	72.042.952.034

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

2. Program dan kegiatan Pendukung jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Khusus untuk meningkatkan Persentase Penduduk Usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB adalah sebagai berikut:

Tabel 4.15
Program/ Kegiatan yang bersumber dari dana APBD

PROGRA M	KEGIATAN		PAGU	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus		6.823.633.120	5.274.891.898
	1	Pengadaan Mebel Sekolah	357.377.200	272.848.900
	2	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	84.786.170	74.132.515
	3	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	625.000.000	489.274.380
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	5.756.469.750	4.438.636.103

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.16
Program/ Kegiatan yang bersumber dari dana DAK

PROGRA M	KEGIATAN		PAGU	REALISASI
-------------	----------	--	------	-----------



Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus		1.929.590.000	1.545.199.061
	1	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	1.193.237.000	993.894.561
	2	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	369.543.000	186.198.800
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	366.810.000	365.105.700

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.17
Program/ Kegiatan yang bersumber dari dana APBD

PROGRA M	KEGIATAN		PAGU	REALISASI
Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pendidikan Khusus		7.647.738.055	7.583.944.304
	1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	7.647.738.055	7.583.944.304

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

B. Bidang Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 4.18
Program dan Kegiatan Pendukung Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2021 (APBD)

PROGRAM	KEGIATAN		PAGU	REALISASI
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	135.749.200	0 (Refocusing)
	2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	73.410.000	73.410.000
	3.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.250.000.000	1.250.000.000



JUMLAH			1.459.159.200	1.323.410.000

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel 4.19
Program dan Kegiatan Pendukung Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan
Kesehatan Tahun 2021 (APBD-P)

PROGRAM	KEGIATAN		PAGU	REALISASI
Program Pemenuhan Upaya Masyarakat	1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3.394.534.620	2.761.921.864
	2.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.689.280.267	2.457.493.222
	3.	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.015.235.760	2.003.213.900
JUMLAH			8.099.050.647	7.222.628.986

C. Bidang Pekerjaan Umum

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program dan kegiatan bidang urusan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota.

Tabel. 4.20
Program dan Kegiatan Bidang Urusan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Curah Lintas kabupaten/kota Tahun 2021 (APBD)

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.340.000.000	1.228.0777,47



Penyediaan Air Minum	(SPAM) Lintas Kabupaten /Kota		
----------------------	-------------------------------	--	--

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi

Kepulauan Riau.

Keterangan :

- Anggaran yang terealisasi hanya 52,48% dari pagu total karena ada dua pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Perpipaan di Jalan Kijang Lama, Kelurahan Melayu Kota Piring karena sudah dilakukan pemasangan di lokasi yang sama oleh Perumda Air Minum Tirta Kepri pada tahun anggaran yang sama dan (2) Pengadaan Pompa PDAM Tanjungpinang dilakukan *refocusing* karena dampak dari pandemi Covid-19.
- 2. Program dan kegiatan bidang urusan penyediaan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di tahun 2021 tidak dianggarkan dan tidak dilaksanakan terkait keterbatasan anggaran.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Program dan Kegiatan Pendukung Jenis Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021 (APBD)

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	855.399.000	382.809.576



Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
--	--	--	--

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau.

Keterangan :

- Anggaran yang terealisasi hanya 44,7 %, ini disebabkan adanya tunda bayar sebesar Rp 395.800.000,00.

E. Bidang Bidang Urusan dan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran adalah sebagai berikut:

Tabel Tabel 4.22

Program dan Kegiatan Bidang Urusan dan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat tahun 2021

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	0	0
	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	0	0

Sumber : Satuan Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau.

F. Bidang Sosial

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2021 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM adalah sebagai berikut :



1. Program Rehabilitasi Sosial, terdiri atas:
 - Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak
 - Kegiatan Pelayanan Sosial Lanjut Usia
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tunasosial dan Korban Perdagangan Orang
2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas:
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
 - Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Tabel 4.23
Program dan Kegiatan Bidang Urusan Sosial Tahun 2021 (APBD)

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	943.040.400	43.040.400
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	466.739.484	463.113.119
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	122.133.807	122.096.642
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	85.020.940	85.013.540
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	623.294.500	618.438.170
JUMLAH		2.240.229.131	2.222.963.726

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau



Tabel 4.24
Program dan Kegiatan Bidang Urusan Sosial tahun 2021 (APBN)

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	REALISASI
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	901.106.000	898.749.500
Jumlah		901.106.000	898.749.500

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau



BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan upaya mengoptimalkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta bahan evaluasi terhadap pencapaian pembangunan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dengan ini Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan LPPD Tahun 2020 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

Perbaikan sistem pelaporan melalui E-LPPD membantu memudahkan ketercapaian monitor terhadap perkembangan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome yang *diupdate* Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga kontrol Tim Penyusun dan Pereviu menjadi lebih baik, walaupun belum sampai menyentuh pada IKK Output yang berjumlah 497 IKK.

Hingga H-1 penyampaian LPPD ini beberapa OPD masih melakukan *update* data karena hasil reviu dari APIP masih menemukan beberapa IKK yang tidak sesuai dengan teknis pengisian maupun data yang tidak tepat dan ada beberapa IKK yang perlu diperbaiki secara sistem karena dipandang belum terlalu tepat. Kedisiplinan OPD dalam mengisi IKK pun masih perlu dilakukan pembinaan karena hal yang sudah seharusnya menjadi tugas dan fungsinya belum terdata dengan baik.

Pada kondisi pandemi Covid-19 ketercapaian IKK baik makro, outcome, maupun output dapat dikatakan tidak optimal, hal ini tidak hanya terjadi di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetapi juga pada struktur pemerintahan di Kabupaten dan Kota serta berimbas pada ketercapaian pembangunan secara nasional.

Pada tahun 2021 tentunya disadari masih banyak kekurangan dan permasalahan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan yang sekaligus akan menjadi prioritas utama yang harus diatasi di tahun yang akan datang demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tanpa menafikan beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau selama ini diucapkan terima kasih dan hal tersebut merupakan hasil kerjasama dan koordinasi dari berbagai elemen yang meliputi; Pemerintah, Masyarakat dan



dunia usaha yang menjadi penggerak roda pembangunan, sehingga harapan keberhasilan yang telah diperoleh dapat terus ditingkatkan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua, didalam menjalankan dan mengemban tugas serta amanah dalam pengabdian kepada masyarakat guna wewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
u.b
KEPALA BUKU PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Drs. EULHENDRI, M.Si
Pembina Utama Madya/ (IV/d)
NIP. 19660611 198602 1 004